

**IDEOLOGI BAHASA: STUDI KASUS PADA OPINI KEKINIAN
TERHADAP IDE KHILAFAH**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana Strata 2

Program Magister Linguistik

Fahrudin Latif
A4C006002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**IDEOLOGI BAHASA: STUDI KASUS PADA OPINI KEKINIAN
TERHADAP IDE KHILAFAH**

Disusun oleh

Fahrudin Latif
A4C006002

Telah disetujui oleh dosen pembimbing tesis
pada tanggal 26 Mei 2008



Pembimbing

Prof. Dr. Sudaryono, S.U.

Ketua Program Studi
Magister Linguistik

Prof. Dr. Sudaryono, S.U.

TESIS

**IDEOLOGI BAHASA: STUDI KASUS PADA OPINI KEKINIAN
TERHADAP IDE KHILAFAH**

Disusun oleh

Fahrudin Latif
A4C006002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 7 Juni 2008 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji
Prof. Dr. Sudaryono, S.U.
NIP. 130 704 306

Penguji I
Dra. Deli Nirmala, M.Hum.
NIP. 131 672 473

Penguji II
Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M.A.
NIP. 131 124 440

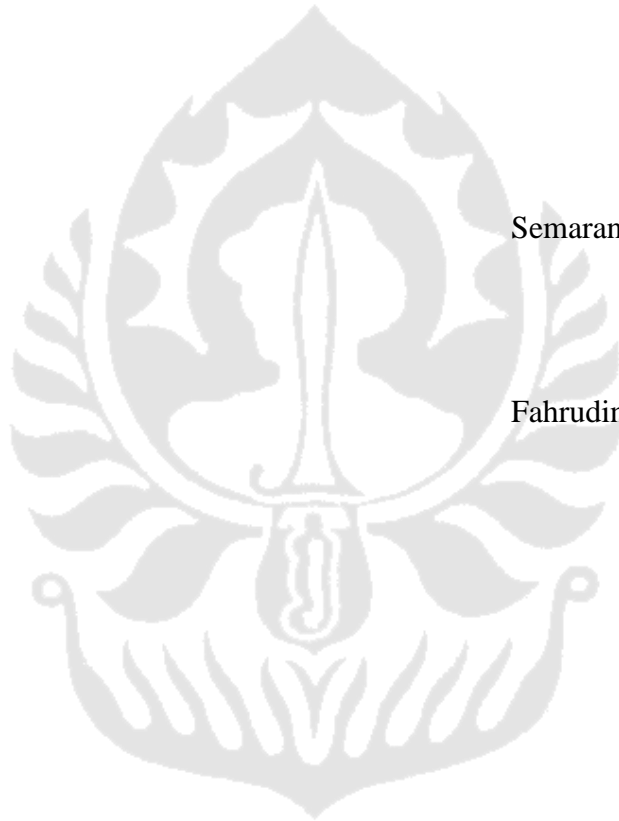
Penguji III
Drs. Muallimin, M.Hum.
NIP. 131 754 152

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya disebutkan dan dijelaskan di dalam teks dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Mei 2008

Fahrudin Latif



PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji penulis panjatkankehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **IDEOLOGI BAHASA: STUDI KASUS PADA OPINI KEKINIAN TERHADAP IDE KHILAFAH.** Tesis berbentuk kajian semantik dengan mengaitkan pada kajian budaya sehingga keterpaduan ini dapat dikategorikan kedalam kajian antropolinguistik. Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Humaniora, konsentrasi Linguistik Umum.

Penulisan tesis ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :

1. Prof. Dr. Sudaryono, S.U., sebagai Ketua Program Studi Magister Linguistik, Pembimbing sekaligus Ketua Penguji yang telah memberikan saran, bantuan dan bimbingan sehingga terselesaikannya tesis ini.
2. Dra. Deli Nirmala, M.Hum. sebagai Sekretaris Program Magister Linguistik dan sebagai Penguji 1
3. Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M.A. sebagai Penguji 2
4. Drs. Mualimin, M.Hum. sebagai sebagai penguji 3
5. Dr. H. Marzuki Noor, M.S. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, yang telah memberikan izin, arahan dan dukungan dalam mengikuti studi di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

6. Drs. Agus Sutanto, M.Si., Suryadi, S.E., yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
7. Drs. Ragil Agustono, M.Si., yang meminjamkan beberapa literatur.
8. Dr. Sudirman, M.Hum, Dosen UM Metro dan Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum., Dosen FKIP UNS via dunia maya sebagai Konsultan Ahli Bahasa atas masukan-masukannya dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. *My dearest wife*, Atik Setyawati, S.Si., yang penuh kerelaan, kesabaran, pengorbanan, pengertian, dukungan dan bantuannya sebagai editor serta do'a dalam memberikan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
10. *My sweet little daughter*, Alliwazzahra Ila Roma, yang telah menjadi inspirasi, motivator dan jiwa.
11. Mbak Ambar, yang telah banyak membantu penulis, mengirim surat, SMS, telpon, dan bantuan-bantuan lain yang memudahkan birokrasi administrasi.
12. Rekan-rekan di Program Pascasarjana Magister Linguistik terutama angkatan 2006/2007, saudara-saudara dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingannya dicatat dan diterima oleh Allah S.W.T. sebagai amal sholeh. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang membutuhkannya. Penulisan tesis ini tentunya masih banyak dijumpai adanya kekurangan sehingga masukan dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Metro, 26 Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Definisi Operasional	7
E. Metode dan Langkah Kerja Penelitian	8
F. Landasan Teori	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian-Penelitian Sebelumnya	12
B. Landasan Teori	17
1. Teori Semantik.....	17
2. Teori Ideologi Bahasa.....	26
3. Khilafah	28
C. Hipotesis.....	37
BAB III CARA PENELITIAN.....	38
A. Penyediaan Data.....	38
B. Analisis Data	41
C. Penyajian Hasil Analisis Data.....	42
BAB IV KHILAFAH DAN IDE KHILAFAH.....	44
A. Sejarah Khilafah 622 – 1924.....	44
B. Khilafah Menjadi Ide Kembali.....	66
C. Hubungan Negara dan Agama	77
D. Proses Pengembalian Ide	78
BAB V MAKNA LEKSIKAL.....	81
A. Kesamaan Makna	81
B. Kebalikan Makna	86
C. Ketercakupan Makna	88

D. Keberlainan Makna.....	90
E. Komparasi Data.....	93
BAB VI IDEOLOGI BAHASA PADA IDE KHILAFAH	96
A. Spiritualitas	97
B. Wilayah	99
C. Kekuatan	101
D. Alasan Terjadinya Opini Pro - Kontra	103
BAB V PENUTUP	106
Simpulan	106
Saran	107
Daftar Pustaka.....	108

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Kebalikan Makna	87
2	Ketercakupan Makna	89
3	Persepsi Tentang Khilafah	93
4	Rekontruksi Leksikon Khilafah	96
5	Kebalikan Makna	97
6	Spiritualitas	97
7	Wilayah	99
8	Kekuatan	101
9	Sikap Terhadap Definisi dan Subtansi Khilafah	104
10	Kesadaran Terhadap Khilafah	105

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Gambar bendera Arroya dan Alliwa	A.1
2	Gambar Peta Wilayah Negara Khilafah 622-1924	A.2
3	Gambar Khalifah: Abdul Hamid II	A.3
4	Gambar Tokoh-Tokoh Dunia	A.4
5	Gambar Cover	A.5
6	Gambar Struktur Negara Khilafah Islam	A.6

DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	JUDUL TEKS	HALAMAN
1.	Khilafah Islam akan segera tegak kembali	B.1
2.	Khilafah: Komentar dan Kritik	B.2
3.	Komentar: Mengapa Ulama Ahlul Hadits Tidak Mendirikan Khilafah?	B.9
4.	Komentar Para Pemimpin Dunia dan Politisi Dunia Tentang Khilafah	B.11
5.	Awal Penderitaan Palestina dan Upaya Mengembalikannya	B.15
6.	Nasionalisme dan Runtuhnya Khilafah Islamiyah	B.18
7.	Masih Tentang Khilafah Islam, Dasar Negara dan UUD '45	B.23
8.	Makna Allah menjadikan Manusia sebagai Khalifah di muka Bumi	B.29
9.	Boigrafi Sultan Abdul Hamid II	B.32
10.	Sekilas SEM Institute	B.40
11.	Kitab Baru Hizbut Tahrir untuk Menyongsong Berdirinya Khilafah	B.41

ABSTRACT

Caliphate idea has been an interesting and essential discussion by society and global leaders. The struggle to re-establish the idea into a state institution has been on going for 84 years. This research studies lexical meaning and language ideology. Its aim is to identify the meaning friction of Caliphate containing language ideology until pro-contra opinion.

The theory used in this research is semantic theory by Verhaar (1978), Factors of Meaning Change by Pateda (1982), Ulman (1970), Forms of Meaning Change by Edi Subrata (1989), consisting of Lexical Meaning a whole by Chaer (2007). Meanwhile, Language Ideology Theory by Moschonas (2004), Hodge (1993), Simpson (1992) and Caliphate Theory by Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (2003).

The research method used in this research is descriptive qualitative. It explains and describes findings in words or phrases. The technique used for data collection in this research is to download from various websites, data recording technique, and classification technique. Meanwhile, the data analysis method used in this research is apportioning method with advanced technique, distributional technique, permutation technique, and substitution technique. The data used in this research is the word *Caliphate* with its synonyms or antonyms written in the multiple texts.

The result of this research shows the meaning friction of Caliphate. It proves the word *Caliphate* with only synonym of *Immamah*, but is found the word *Caliphate* comparing with *Kepala*, *Imperium Islam*, until to discredit it by its equivalence to the word *Terrorism*. So Moslems have a tendency to interpret *Caliphate* as a leadership in all sectors not one in Islamic State. Language ideology on Caliphate idea can be found by spirituality, territory and power. It can not be separated from Caliphate idea because this idea is always struggled to legalize in a state institution formally and totally. Pro-Contra opinion reflects Indonesian culture as two sides, they are pro, pure Moslems or contra, secular Moslems. From the data validation by SEM Institute, actually the number of contra sides is minority, but they always win public opinion. So Secular Society Culture more dominates causing some difficulties to Moslem united in Caliphate State.

It is suggested that other researchers can continue language research connected with ideology. Language ideology and Caliphate Ideology can establish a new era bringing to Indonesian civilization culture and global society.

INTISARI

Ide Khilafah telah menjadi perbincangan yang menarik dan hangat mulai dari masyarakat umum sampai dengan para tokoh dunia. Perjuangan mengembalikan ide pada sebuah institusi negara telah berjalan 84 tahun lamanya. Penelitian ini mengkaji adanya makna leksikal dan ideologi bahasa, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pergeseran makna kata Khilafah yang didalamnya terdapat ideologi bahasa sampai terjadi opini pro dan kontra.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semantik yang dikemukakan oleh Verhaar (1978), Faktor Perubahan Makna oleh Pateda (1982), Ulman (1970), Wujud Perubahan Makna oleh Edi Subrata (1989), yang tercakup keseluruhan dalam Makna Leksikal oleh Chaer (2007). Sedangkan Teori Ideologi Bahasa dikemukakan oleh Moschonas (2004), Hodge (1993), Simpson (1992). Sementara itu teori Khilafah dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (2003).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan temuan-temuan dengan kata-kata atau frasa. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik mengunduhnya dari berbagai website, teknik pencatatan, dan teknik klasifikasi. Sementara itu, untuk analisis data digunakan metode agih dengan teknik lanjutan teknik lesap, teknik balik, dan teknik ganti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata Khilafah beserta sinonimnya atau antonimnya yang digunakan dalam berbagai teks.

Hasil Penelitian berupa terjadinya pergeseran makna Khilafah. Hal ini terbukti dengan kata *Khilafah* yang hanya bersinonim dengan kata *Imamah*, namun ditemukan kata *Khilafah* disamakan dengan kata, *Kepala*, *Imperium Islam*, sampai-sampai untuk mendeskripsikannya disepadankan dengan kata *Terrorisme*. Sehingga ummat Islam lebih cenderung memaknai khilafah dalam arti kepemimpinan dalam segala bidang bukan kepemimpinan dalam sebuah negara Islam. Ideologi bahasa pada ide khilafah dapat dijumpai pada adanya spiritualitas, territory/wilayah dan power/kekuatan. Ketiga hal ini tidak dapat lepas dari ide Khilafah sebab ide ini selalu diperjuangkan untuk dilegalformalkan dalam sebuah institusi negara yang pasti membutuhkan ketiga hal tersebut secara mutlak. Opini pro kontra merupakan cermin budaya Indonesia bahwa setidaknya ada dua sisi, yaitu pihak pro, muslim yang masih murni atau pihak kontra, muslim yang sekuler. Data dari SEM Institute diperoleh untuk lebih memberikan validasi data bahwa sebenarnya pihak kontra jumlahnya minoritas, namun pihak ini selalu memenangkan opini publik, sehingga budaya masyarakat sekuler lebih mendominasi yang berakibat ummat Islam sulit bersatu dalam naungan Negara Khilafah.

Hendaknya ada yang melanjutkan penelitian bahasa ini terkait dengan ideologi, ideologi bahasa dan ideologi khilafah terhadap pembentukan peradaban baru yang membawa pencerahan bagi khasanah budaya masyarakat Indonesia, khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Bahasa merupakan sesuatu yang ada pada setiap manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi antarmanusia merupakan sesuatu yang vital. Melalui bahasa, manusia dapat bertukar ide, gagasan, pendapat bahkan menyebarkan ideologi. Ide khilafah, misalnya. Ide ini telah dilegalformalkan dalam sebuah negara di Madinah dengan Kepala Negara dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.

Salah satu pembahasan yang menarik berkaitan dengan ideologi bahasa adalah opini tentang ide khilafah. Khilafah sendiri adalah salah satu sistem pemerintahan berasaskan Islam yang diterapkan oleh negara global yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khilafah dengan Ideologi Islamnya telah mampu menyatukan umat Islam seluruh dunia, mulai dari Jazirah Arab, Afrika, Asia, sampai Eropa selama 1.300 tahun. Islam mampu menyatukan berbagai bangsa, warna kulit, suku, ras dan latar belakang agama yang berbeda. Meskipun pada kenyataan berikutnya, sistem kekhalifahan runtuh pada 24 Maret 1924 oleh Musthafa Kemal At-Taturk. Perkembangan selanjutnya menjadi sebuah ide kembali yang ramai diperbincangkan berbagai kalangan. Ide khilafah hanya diemban oleh individu-individu dengan berbagai

makna yang berbeda. Selain perbedaan makna, ide khilafah pun mengalami respon baik yang pro maupun kontra.

Sekarang ini, ide Khilafah bukanlah suatu topik asing di berbagai kalangan masyarakat. Salah seorang kepala negara adidaya George W. Bush pun menganggap perlu untuk mengomentari ide khilafah. Agen inteligennya, National Intelligence Council's (NIC) membuat sebuah laporan tentang khilafah pada Desember 2004 lalu. Laporan tersebut berjudul "*Mapping the Global Future*". Laporan ini memprediksi akan adanya empat skenario dunia tahun 2020, salah satu di antaranya adalah akan berdirinya "A New Chaliphate", yaitu berdirinya kembali Khilafah Islam—sebuah pemerintahan Islam global yang mampu memberikan tantangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai global Barat. Terlepas dari apa maksud dipublikasikannya laporan tersebut, paling tidak, kembalinya negara Khilafah Islam menurut kalangan penganalisis dan intelijen Barat termasuk hal yang harus diperhitungkan.

Prediksi dari NIC tentang munculnya kembali khilafah ini memperkuat tesis Samuel P. Huntington, seorang cendekiawan Amerika, tentang "*The Class of Civilization*". Sebuah tesis yang banyak dipertentangkan. Meski banyak ditentang, teori benturan peradaban pada faktanya tidak dapat dipungkiri. Realitas politik yang ada sejak Pasca Era Perang Dingin memperlihatkan bahwa benturan Peradaban Barat dengan Islam sedang berlangsung. Benturan Peradaban Islam dengan Peradaban Barat saat ini sebenarnya merupakan lanjutan benturan yang pernah terjadi

pada masa lalu, yaitu masa terjadinya Perang Salib, perang yang terjadi antara umat Islam dengan umat Nasrani.

Fakta opini tentang ide khilafah menyebar dalam bentuk bahasa lisan dalam dialog interaktif, seminar, bedah buku, ceramah dan sebagainya, sedangkan dalam bentuk tulisan dapat berupa buletin, koran, jurnal, majalah, website dan sebagainya. Dari sekian banyak bentuk munculnya opini tentang ide khilafah tersebut, penulis memilih bentuk bahasa tulis khususnya yang ada di beberapa website dengan teks yang berbahasa Indonesia atau hasil terjemahan ke dalam bahasa Indonesia saja. Penelitian mengenai ideologi bahasa melalui website memiliki beberapa alasan.

Pertama, data melalui website sangat mudah didapat, dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja, sumber data ini dapat diakses. Dengan kata lain website dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan maupun masyarakat dunia. Demikian pula seluruh masyarakat dapat menuangkan opininya dalam dunia maya ini. Sehingga terbentuklah masyarakat global yang saling berinteraksi dan berkomunikasi.

Kedua, Untuk membatasi meluasnya data yang tercakup, penulis hanya mengunduh data yang berbahasa Indonesia saja dan atau hasil terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Sebab opini tentang ide khilafah telah mendunia, sedangkan setiap masyarakat dunia memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga perlu pembatasan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang akan membatasi cermin budaya masyarakat Indonesia.

Ketiga, mayoritas masyarakat Indonesia muslim, sedangkan ide khilafah sudah diperjuangkan selama 84 tahun lamanya namun perjuangan mengembalikan ide Khilafah ke dalam sebuah institusi negara belum terwujud. Muncul masalah bahwa negara yang penduduknya mayoritas muslim ternyata masih terjadi pro-kontra terhadap ide khilafah. Hal ini menarik untuk dicari jawabannya melalui penelitian khususnya yang terkait dengan makna, sedangkan makna Khilafah sendiri akan semakin terungkap jawabannya apabila dikaitkan dengan budaya masyarakat Indonesia.

Penelitian tentang makna Khilafah yang dikaitkan dengan budaya yang akan mencerminkan ideologi bahasa belum ada yang melakukan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian antropolinguistik khususnya tentang ideologi bahasa.

Berdasarkan hal tersebut diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah kata khilafah mengalami pergeseran makna?
- b. Apakah ideologi bahasa terdapat pada ide khilafah?
- c. Mengapa terjadi pro kontra di masyarakat terhadap ide khilafah?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadinya pergeseran makna satu kata sehingga dapat mempengaruhi mental konsep pemakainya.
- b. Untuk membuktikan adanya ideologi bahasa pada ide khilafah.

- c. Untuk mengetahui makna kalimat sehingga dapat digolongkan sebagai kalimat pro maupun kontra terhadap ide khilafah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Pergeseran makna dapat mempengaruhi mental konsep pengembangan ide khilafah sehingga ummat Islam perlu kembali kepada makna dasar agar tidak terjadi perpecahan di antara mereka.
- b. Adanya kekuatan pada ide khilafah sehingga timbul realitas linguistik sebagai dasar ideologi bahasa yang akan mempertajam kajian ideologi bahasa berikutnya.
- c. Opini pro kontra terhadap ide khilafah memiliki alasan masing-masing, dengan mengetahui alasannya dapat mempertajam kajian ideologi bahasa.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah data yang diakses melalui internet mulai tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 6 Januari 2008. Data berupa teks tertulis pernyataan-pernyataan mulai dari tokoh-tokoh kenegaraan sampai dengan rakyat biasa. Teks yang diambil adalah teks-teks yang berbahasa Indonesia asumsinya bahwa setiap bahasa memiliki budaya yang berbeda-beda. Kata 'Khilafah', yang berasal dari bahasa Arab dapat mengalami pergeseran makna, baik makna meluas maupun menyempit bahkan memiliki makna yang tetap sama dengan bahasa aslinya. Sementara itu banyak kosa

kata bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia mengalami pergeseran makna.

Tulisan ini akan mengkaji pengaruh keberadaan Khilafah Islam yang berpusat di Timur Tengah, khususnya pada masa Utsmaniyah, terhadap kehidupan umat Islam di Nusantara. Kajian didasarkan pada suatu kerangka analisis bahwa dengan adanya Khilafah, umat Islam berada di bawah satu kepemimpinan. Khalifah merupakan pelindung kaum Muslim. Para penguasa kaum Muslim di berbagai belahan dunia dengan sendirinya akan mengakui dan tunduk pada Khalifah. Gangguan terhadap umat Islam di suatu negeri dianggap sebagai gangguan terhadap seluruh kaum Muslim; Khalifah akan berperan aktif mengamankannya.

Teori semantik digunakan untuk menjelaskan terjadinya pergeseran makna khilafah. Teori ideologi bahasa digunakan untuk menjelaskan adanya ideologi bahasa pada ide khilafah. Sesuai dengan definisi operasionalnya, Ideologi bahasa adalah kombinasi antara spiritualitas (*spirituality*) – keyakinan (*beliefs*) dan wilayah (*territoriality*) yang memunculkan kekuatan (*power*) sehingga muncul pula pihak yang merasa tertindas yang dapat diposisikan sebagai pihak critical (-) sedangkan posisi penindas selalu pada pihak critical (+). Posisi pihak netral sebagai pihak yang tidak memiliki pilihan, sehingga ekosistem ini dapat dijadikan realitas linguistik (*linguistics relativity*) sebagai dasar ideologi bahasa (*linguistics ideology*).

D. Definisi Operasional

Penelitian ini mempergunakan beberapa istilah penting yang sering dipergunakan, agar pemakaiannya dapat dilakukan secara konsisten, pengertian istilah tersebut dibatasi antara lain:

1. Ideologi adalah keyakinan yang diperoleh dari proses berpikir, memiliki pemikiran dan pola operasional yang terpancar di atasnya peraturan-peraturan.
2. Ideologi bahasa adalah kombinasi antara spiritualitas dan wilayah yang memunculkan kekuatan sehingga muncul pula pihak yang merasa tertindas sehingga ekosistem ini dapat dijadikan realitas linguistik sebagai dasar ideologi bahasa.
3. Ideologis adalah memiliki sifat ideologi.
4. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki pemikiran, perasaan dan peraturan yang sama yang mampu mengikat seluruh anggotanya.
5. Peradaban adalah sekumpulan pemahaman tentang kehidupan.
6. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang keseluruhan hukum-hukumnya berdasarkan hukum-hukum Islam, yaitu, Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Sahabat dan Qiyas.
7. Khalifah adalah seseorang yang diangkat melalui ba'iat seluruh rakyatnya baik langsung maupun tidak langsung atau melalui wakil-wakilnya yang duduk di Ahlul Halli wal Aqdi atau semacam majelis perwakilan rakyat.

Khalifah adalah sebutan bagi kepala negara dalam sistem pemerintahan yang berbentuk khilafah.

E. Metode dan Langkah Kerja Penelitian

Metode yang dipilih adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena korpus penelitian berupa teks wacana tertulis yang diakses melalui beberapa situs internet. Pengumpulan bahan dalam penelitian kepustakaan dilakukan melalui inventarisasi (pencatatan). Metode yang dipakai melalui pendekatan antropolinguistik.

Pengolahan bahan dan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode (pendekatan) antropolinguistik dengan berdasar pada analisis interpretasi (penafsiran) objektif.

Penyajian hasil pengolahan data dengan menggunakan metode formal dan informal. Dalam metode formal disajikan rumusan hasil analisis, sedangkan informal dengan kata-kata biasa.

F. Landasan Teori

Penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan teori pada penelitian ini. Teori semantik dan ideologi bahasa dari berbagai sumber tersebut hanya diambil satu teori yang dianggap telah mewakili seluruh teori yang ada. Apabila belum ada pakar bahasa meringkas teori tersebut maka penulis meringkas beberapa teori tersebut seperti pada teori ideologi bahasa. Paparan teori-teori yang lebih rinci akan dijelaskan dalam Bab II Tinjauan Pustaka.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang meliputi, pertama, latar belakang dan masalah yang memaparkan tentang alasan penulis memilih topik ini. Kedua, tujuan dan manfaat penelitian memaparkan tentang beberapa tujuan dari penelitian ini sekaligus manfaatnya. Pada bagian ruang lingkup penelitian, penulis perlu membatasi waktu pengumpulan data dan menjelaskan pula rencana pengklasifikasian data. Dalam menjelaskan penggunaan istilah yang sering digunakan, penulis menjelaskan definisi operasional yang diambil dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di bidangnya. Hal ini dilakukan agar istilah yang digunakan terjadi kekonsistenan. Sementara, metode dan langkah kerja penelitian dibuat untuk menjelaskan metode penelitian yang dipilih, ujud korpus penelitian yang diambil, dan pendekatan yang dipakai. Sebelum mengakhiri bab ini, penulis perlu juga menjelaskan garis besar yang memuat paparan ringkasan teori-teori yang akan digunakan dalam analisis, baik teori pokok maupun pendukung. Pada bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan agar penulis dapat merunut isi secara keseluruhan.

Pada bagian berikutnya, Bab II Tinjauan Pustaka akan dibahas tentang penelitian-penelitian sebelumnya, landasan teori yang terdiri dari tiga bagian yaitu, teori semantik, teori ideologi bahasa dan teori khilafah. Penelitian-penelitian sebelumnya digunakan untuk menunjukkan keorisinalan penelitian ini sekaligus memperkuat baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini.

Sehingga bagian-bagian yang belum diteliti dapat ditindaklanjuti oleh peneliti sendiri maupun peneliti-peneliti lain. Penulis menganalisa data dengan menggunakan landasan teori yang ada. Teori-teori yang digunakan adalah teori yang relevan dengan penelitian ini. Untuk mengakhiri Bab II, penulis membuat sebuah hipotesis untuk memperkirakan temuan yang akan dicapai dalam penelitian ini.

Pada Bab III Cara Penelitian, dijelaskan secara rinci bagaimana melakukan penelitian ini yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu, penyediaan data, analisis data dan penyajian hasil analisis data. Penulis memaparkan penyediaan data tentang cara memperoleh data, ujud data dan sumber data. Sedangkan data hasil survey SEM Institute digunakan untuk memperkuat validasi data mengenai keberagaman opini di masyarakat. Kemudian dijelaskan juga tentang fungsi dari teori-teori yang digunakan dan metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data. Pada analisis data, penulis menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pergeseran makna dari kata 'Khilafah' dan mengidentifikasi ideologi Khilafah dari leksikon dari ajaran Khilafah. Bab ini diakhiri dengan penyajian analisis data, penulis merumuskan kembali bahwa penyajian hasil analisis data terdiri dari makna leksikal dan ideologi bahasa pada ide Khilafah.

Bab IV Khilafah dan Ide Khilafah, digunakan untuk merekonstruksi kembali sejarah khilafah mulai dari tahun 622 M disaat Khilafah secara resmi digunakan dalam sistem kenegaraan sampai tahun 1924 saat sistem ini diruntuhkan dan menjadi ide kembali. Data penelitian ini berupa teks

berbahasa Indonesia sehingga perlu dijelaskna juga tentang jejak Khilafah dan Syari'at Islam di Indonesia. Penulis mengakhiri Bab ini dengan cara untuk pengembalian ide kedalam sistem kenegaraan kembali.

Pada Bab VI dan VII, penulis mendeskripsikan hasil analisis datanya tentang makna leksikal dan ideologi bahasa pada Ide Khilafah. Pada makna leksikal diperinci lagi menjadi, kesamaan makna, kebalikan makna, ketercakupan makna, keberlainan makna, serta validasi data. Sedangkan untuk menganalisa Khilafah dengan maksud membuktikan ideologi khilafah ada pada ide Khilafah maka penulis menjelaskan tentang , spiritualitas, teritory, power dan alasan terjadinya opini pro – kontra.

Akhirnya tesis ini ditutup dengan simpulan dan saran sebagai Bab V. Penulis membuat kesimpulan dari hasil analisisnya untuk menjawab rumusan masalah, maka diperoleh tiga simpulan agar penulis dapat mengarahkan penelitiannya sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian. Penulis juga menyarankan pada peneliti-peneliti lain untuk menindaklanjuti penelitian ini demi kesempurnaan penelitian ideologi bahasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang ideologi bahasa memang belum banyak dilakukan di Indonesia sebab para peneliti di tanah air tampaknya belum tertarik dengan penelitian ideologi bahasa. Berdasarkan penelusuran melalui internet, penelitian tentang ideologi bahasa baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Andre Michel Jacobs dalam disertasinya untuk memperoleh gelar doktor filsafat pada Universitas Texas di Austin, meneliti tentang ideologi bahasa pada kaum wanita. Judul disertasinya adalah "*Language Reform as Language Ideology: An Examination of Israeli Feminist Language Practice*". Jacobs mengkaji tentang hubungan antara penggunaan bahasa, ideologi bahasa, dan konstruksi gender, identitas gender secara budaya-kemasyarakatan. Ia menganalisis tentang identitas diri 15 orang kaum feminis di Israel antara perilaku linguistik wacana meta-linguistik. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menentukan bagaimana ideologi berkaitan dengan bahasa, gender dan filsafat pada perubahan masyarakat yang mempengaruhi fakta-fakta struktural dan sosiolinguistik terhadap Bangsa Yahudi Modern di Israel, serta untuk mempertajam praktik penggunaan bahasa yang alamiah maupun yang memiliki maksud tertentu dari para wanita tersebut.

Teori yang digunakan adalah konsep indeksikal dalam buku *Rethinking context* (Ochs 1992) dan praktik masyarakat dalam buku *The Community of Practice: Theories and Methodologies in Language and Gender Research* (Holmes dan Meyerhoff 1999) untuk menguji bagaimana para partisipan menggunakan sumber-sumber bahasa di dalam menampilkan budaya-masyarakat untuk merundingkan identitas masyarakat yang saling terkait antara kaum feminis dalam konteks masyarakat Yahudi Israel.

Disertasi Jacobs ini menggunakan analisis sosiolinguistik lengkap baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap para informan. Informan menjelaskan bagaimana mereka menggunakan variabel dari kaum feminis dan varietas bahasa yang disepakati oleh masyarakat Yahudi Israel untuk mengungkapkan antara maksud referen dan maksud indeksikal masyarakat. Disertasi ini membahas kemungkinan maksud masyarakat terhadap variasi inter-pembicara dan intra-pembicara. Ia mengungkap maksud yang dapat atau tidak dapat diketahui tentang setiap status wanita dalam komunitasnya sebaik dengan hubungan keseluruhan antara penggunaan bahasa dan kealamiahannya yang teratur terhadap komunitas kaum feminis di Israel.

Akhirnya disertasi ini menguji strategi linguistik melalui dua orang wanita, yaitu, seorang wanita Israel politisi feminis dan seorang lagi adalah Yahudi aktivis feminisme yang menikah dengan laki-laki Arab. Strategi linguistik ini untuk mengetahui bagaimana kaum feminis

menggunakan seperangkat tampilan linguistik secara penuh untuk merundingkan identitasnya dalam konteks budaya-kemasyarakatan. Temuannya berupa, investigasi penggunaan bahasa melalui sosiolinguistik harus menguji baik sikap bahasa maupun wacana metalinguistik. Hal ini untuk menjelaskan hubungan praktik penggunaan bahasa dan identitas sosial para pemakainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Giuliano Benassi pada Universitas Konstanz Fakultas Filsafat dengan judul, *“Political Correctness and Ideology: A Cross-Cultural Linguistic Study”*. Seperti disebutkan dalam tujuan tesisnya, yaitu membicarakan tentang hubungan bahasa dan kebudayaan, argumennya adalah kajian bahasa menimbulkan sejumlah pertanyaan yang tak mungkin terjawab apabila dipandang dari sudut pandang keabstrakkannya (*langue* oleh Saussure) dan realisasi struktur interaksinya (*Parole* oleh Saussure). Tesis Benassi ini membahas model alternatif yang dikembangkan dalam ranah Linguistik, Sosiologi dan Filsafat, bahwasanya arti tidak sekedar transfer proposisi yang diungkapkan dari pembicara kepada pendengar, tetapi merupakan proses yang sangat rumit. Proses ini termasuk juga partisipan terhadap interaksi linguistik dan sangat bergantung pada faktor-faktor lainnya, yaitu di luar ranah Linguistik, seperti konteks interaksi.

Thesis Benassi ini menampilkan arti dan pemahaman yang tidak mengikuti seperangkat aturan yang diberikan sebelumnya, namun arti dan pemahaman terdiri dari interaksi di luar situasi berdasar pada keyakinan

bahasa dan budaya yang dipelajari terkumpul dalam pemikiran sebuah ideologi. Thesis ini membahas dampak model termasuk juga revisi relativitas linguistik dan budaya.

Thesis Benassi juga membahas pembenaran secara politis. Pembahasan hal ini nampak telah mencapai tingkat puncak pada tahun 1992 di Amerika Serikat dan sejak tahun itu pula, lambat laun Amerika merosot dari puncaknya. Thesis Benassi membahas pemikiran tidak berdasarkan sudut pandang linguistik. Pemikiran secara terpisah memperbaharui garis-garis kuantitas masalah. Dijumpai banyaknya aspek lain, seperti banyaknya istilah alternatif dan kritik bahwa bahasa memiliki 'bias', berdasarkan faktor seperti gender, kesukuan dan berdasarkan jenis kelamin, tampaknya menarik juga dibahas dari sudut pandang linguistik.

Penelitian ketiga tentang ideologi bahasa dilakukan oleh Patrick Heinrich (2002). Thesisnya berjudul, "*Language Ideology in Modern Japan*". Thesis ini membicarakan tentang penciptaan dan efek ideologi bahasa Jepang modern dalam konteks modernisasi di Jepang.

Ideologi bahasa menurut Heinrich mengkaji keaslian dan efek keyakinan tentang struktur bahasa dan penggunaan bahasa sebagaimana keyakinan-keyakinan tersebut (a) dipromosikan dan (b) menyebar pada kelompok masyarakat. Berdasarkan definisi ideologi bahasa tersebut, perbedaan yang luas terjadi antarakomisi ideologi bahasa dan margin linguistik. Setengah laporan Heinrich membahas tentang modernisasi bahasa yang mempertajam ideologi bahasa sebagai pembentuk bahasa

Jepang modern. Sementara sisanya, efek dari modernisasi bahasa pada margin linguistik.

Thesis Heinrich ini pun menggambarkan bagaimana ideologi bahasa selalu melibatkan latar belakang emansipasi dan kekuatan. Berdasarkan latar belakang inilah timbul aspek penindasan. Keadaan ini menggambarkan bagaimana ideologi bahasa mempertajam realitas linguistik. Realitas ini akan menjadi semacam lingkaran yang akhirnya bertemu kembali pada validitas ideologi bahasa.

Tulisan-tulisan lain yang terkait dengan ideologi bahasa, misalnya, Reagan, Timothy ``*Language Policy, Politics, and Ideology: The Case of South Africa. (1984.) Issues in Education. V2 n2 p155 64 Fall 1984 NT: Single copies are available from: American Educational Research Association, 1230 17th Street, N.W., Washington, DC 20036 (\$6.00).* Ia mengkaji suatu kasus yang terjadi di Afrika Selatan. Artikelnya menjelaskan tentang ideologi bahasa dalam tataran politik. Namun artikel ini tidak memandang bahasa yang dibandingkan antarideologi. Demikian pula artikel yang ditulis Khubchandani, Lachman ``*Language Ideology and Language Development: An Appraisal of Indian Education Policy (1977.) Linguistics. 193; 33 51.* Artikel Khubchandani menyoroti aspek kebijakan dalam pendidikan.

Ideologi bahasa pada penelitian ini berbeda dengan ideologi bahasa yang terdapat pada penelitian atau artikel yang disebutkan sebelumnya. Ideologi bahasa diteliti melalui satu ideologi dibandingkan

dengan ideologi dunia yang lain sebagai faktor pembanding. Akhirnya dapat ditarik simpulan bahwa ideologi bahasa yang terdapat pada ideologi tertentu akan selalu berlawanan satu dengan yang lainnya sebagai karakteristik alamiahnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Semantik

Teori semantik digunakan untuk menjelaskan terjadinya pergeseran makna pada ide khilafah. Setiap kata atau leksem mempunyai makna leksikal, yakni makna yang secara inheren terdapat di dalam kata atau leksem itu, Verhaar 1978) dalam Chaer (2006:138) kata secara sinkronik, dalam waktu yang relatif singkat, tidak akan berubah, tetapi secara diakronik, yakni dalam waktu yang relatif lama, ada kemungkinan dapat berubah. Perubahan terjadi sebagai akibat dari penggunaannya bisa bersifat total, berubah menyempit atau berubah meluas.

Ditinjau dari sisi makna dalam pemakaian bahasa sehari-hari dan dalam penyerapan, kadang-kadang kata yang digunakan berubah maknanya dari makna semula (Pateda, 1982: 148 – 158). Perubahan makna tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni: (a) faktor kesejarahan (*historical causes*), (b) faktor kebahasaan (*linguistic causes*), (c) faktor sosial (*social causes*), dan (d) faktor psikologis (*psychological causes*) (Ulman, 1970: 197-210, Pateda, 1982: 71-72, dan Edi Subroto, 1989:44).

Contoh :

- a. Faktor kesejarahan (*historical causes*) “pena” dulu bermakna ‘bulu angsa’, tetapi sekarang bermakna ‘sejenis alat tulis bertinta’. Kalau ditelusuri sejarahnya memang ada; dulu orang menulis dengan menggunakan tangkai bulu angsa sebagai alatnya yang dicelupkan ke dalam tinta. Kini bulu angsa sudah tidak dipakai lagi sebagai alat tulis, sebagai gantinya digunakan sejenis logam yang diberi nama pena, yang dalam bahasa Inggris disebut ‘pen’, ‘fullpen’ dan ‘ballpen’.
- b. Faktor kebahasaan (*linguistic causes*). Kata ‘sahaya’ pada mulanya dihubungkan dengan ‘budak’, kemudian berubah menjadi “saya”, maka kata tersebut selalu mengacu kepada pronomina pertama netral (tidak ada unsur tidak hormat/hormat) dan bila dibandingkan dengan aku, maka aku mengandung unsur intim.
- c. Sebab sosial muncul akibat perkembangan kata itu di masyarakat, misalnya kata “gerombolan” pada mulanya bermakna ‘orang yang berkumpul’ atau ‘kerumunan orang’ tetapi kemudian kata tersebut tidak disukai lagi karena selalu dihubungkan dengan ‘pemberontak atau perampok’ dan sebagainya.
- d. Faktor psikologis (*psychological causes*) yang berupa : faktor emotif, kata-kata tabu : (1) tabu karena takut, misalnya, penduduk di desa-desa zaman dulu bila masuk hutan tidak boleh menyebut kata *ular* atau *harimau* karena ada kepercayaan kalau disebutkan namanya secara langsung maka

kedua binatang itu akan marah, dan ada kemungkinan akan mencelakakan orang yang menyebutkannya. Oleh karena itu, kata *ular* itu diganti dengan kata *akar* atau *oyod* oleh orang Jawa, dan kata *harimau* diganti dengan kata *nenek* oleh orang Sumatra. (2) tabu karena kesopanan, misalnya, kata-kata yang berkenaan dengan alat kelamin dan hubungan kelamin tidak boleh digunakan, melainkan harus diganti dengan kata lain yang secara tidak langsung menyatakan alat kelamin atau hubungan kelamin itu. Begitulah kata yang menyatakan alat kelamin karena tabu untuk diucapkan lalu diganti dengan kata *kemaluan*, *rahasia laki-laki*, atau *kehormatan wanita*, sedangkan hubungan *kelamin* disebutkan dengan kata-kata *berhubungan badan*, atau *hubungan suami-istri*.

Adapun wujud perubahan makna menurut Edi-Subrata (1989: 44) adalah (a) perubahan kategori, (b) perubahan verba pasif, (c) perubahan referensial, (d) perubahan makna meluas, (e) perubahan makna menyempit, (f) Perubahan makna jamak menjadi mufrad. Berhubungan dengan perubahan referensial, Peteda (1982: 89) menyatakan bahwa ada kata yang lambangnya berubah.

Contoh:

a. Perubahan Kategori

Adapun yang dimaksud perubahan kategori di sini adalah perubahan dari *isim* (nomina) menjadi *fi'il* (verba) atau perubahan dari nomina menjadi adjektiva. Dalam bahasa Arab kategori *isim* (nomina) terbagi menjadi beberapa subkategori, yakni *masdar*, *ismul fa'il*, (*active*

participle), *ismul-maf'ul* (*passive participle*), dan *ismu't-tafdh'il* (*superlatif*).

Adapun perubahan kategori tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1) Perubahan Subkategori Masdar Menjadi Verba

Kata-kata serapan berupa *masdar* seperti *fahm*, *fikr*, dalam bahasa Arab termasuk subkategori nomina. Setelah diserap berubah menjadi verba dan dapat berlaku sebagai verba tanpa afiks. Hampir semua kata serapan dari bahasa Arab dianggap sebagai kata dasar dan dapat diturunkan dengan proses afiksasi, reduplikasi dan pemajemukan.

2) Perubahan Subkategori Masdar Menjadi Adjektiva

Sebagai contoh untuk perubahan ini adalah kata *ikhlas* (*keikhlasan*) berbentuk *masdar* berubah menjadi *adjektiva*. Sebenarnya dalam bahasa Arab *adjektiva* dari *masdar* tersebut adalah *mukhlis* (orang yang *ikhlas*). Kata *muklis* juga terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sama dengan kata *ikhlas*.

3) Perubahan Subkategori *Ismul-Fa'il* (Active Participle) Menjadi Adjektiva

Semua bentuk *Ismul-Fa'il* dalam bahasa Arab maknanya adalah sebagai pelaku pekerjaan yang terkandung dari verbanya. Contohnya adalah kata *Adil* sebagai pelaku dari verba *adala*. Semua bentuk

Ismul-Fa'il (Active Participle) dari semua *wazan* (pola), mempunyai makna pelaku pekerjaan dari verbanya.

- 4) Perubahan Subkategori *Ismul-Maf'ul (Passive Participle)* Menjadi Adjektiva.

Dalam bahasa Arab *ismul-maf'ul* selain sebagai *ism* (nomina) digunakan juga sebagai *shifah* (adjektiva). Misalnya kata, *mambrur*, *masgul*, *mashur* dan *mujarab*.

- 5) Perubahan Subkategori *Ismu't-Tafdhil (Superlatif)* menjadi Adjektiva.

Ismu't-Tafdhil dalam bahasa Arab digunakan untuk menyatakan perbandingan yang bermakna lebih. Selain itu, juga digunakan sebagai adjektiva. Setelah terserap ke dalam bahasa Indonesia *Ismu't-Tafdhil* ini lebih banyak digunakan sebagai adjektiva. Contoh kata : *Afdhol*, *akrab*, *akbar*.

- b. Perubahan Verba Pasif

Ada verba pasif yang terserap ke dalam bahasa Indonesia, yakni *kutib* (<*kutib*) dan *nukil* (<*nuqil*). Setelah terserap dalam bahasa Indonesia verba pasif tersebut hilang kadar kepasifannya. Kata *kutib* 'ditulis' adalah bentuk pasif dari verba *kataba* yang artinya adalah 'menulis'. Setelah kata tersebut diserap kedalam bahasa Indonesia hilangnya kepasifannya, sehingga kalau akan dipasifkan ditambah

dengan prefiks di- menjadi *dikutib*. Jika ingin dibuat verba aktif ditambah prefiks me- sehingga menjadi *mengutip*.

c. Perubahan Referensial

Perubahan acuan atau perubahan referensial terjadi pada kata-kata serapan dari bahasa Arab. Sebagai contoh adalah kata '*jilid*' yang semula bermakna kulit. Dalam bahasa Arab sesuatu misalnya *buku* jika diberi bungkus (cover) disebut *mujallad* yang bermakna diberi kulit. Dalam bahasa Indonesia kata *jilid* ini dipakai juga untuk memberi sampul sejumlah lembaran kertas. Pemberian sampul tersebut disebut juga penjilidan. Sejumlah besar kertas dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan dijilid. Dari pembagian setumpuk kertas dan pemberian sampul menjadi beberapa bagian, maka lahirlah istilah *jilid satu*, *jilid dua*, dan seterusnya. Akhirnya kata *jilid satu*, *jilid dua* dan seterusnya mempunyai acuan atau referen yang berubah dari yang diberi kulit menjadi jilid (volume).

d. Perubahan Makna Meluas

Contoh kata-kata yang mengalami perluasan makna antara lain, kata *fatwa* maka semua adalah 'jawaban atas pertanyaan perihal hukum Islam kepada seorang mufti'. Maknanya kemudian meluas kepada bukan hanya berkaitan dengan hukum Islam, misalnya fatwa Mahkamah Agung, fatwa MUI, fatwa Pujangga. Selebihnya, makna meluas sebagai petuah (nasehat).

e. Perubahan Makna Menyempit

Di dalam pemakaian bahasa, sebuah leksem dapat mengalami pembatasan makna. Kata-kata serapan dari bahasa Arab ada yang berubah dari makna umum ke makna khusus. Pembatasan makna dari umum ke khusus biasanya terjadi di lingkungan khusus keagamaan seperti kata '*alim*' semula berarti 'orang yang pandai' menjadi 'orang yang mengetahui masalah-masalah agama.'

f. Perubahan Makna Jamak menjadi Mufrad

Kata-kata serapan bermakna jamak banyak dipakai untuk pengertian *mufrad*. Jika diperlukan makna jamaknya, setelah kata-kata itu diserap dalam bahasa Indonesia, dipergunakan penanda jamak, misalnya kata *ulama* dijamakkan menjadi *ulama-ulama* atau '*para ulama*'.

Sementara Chaer (2007:68) menyatakan bahwa secara umum makna leksikal mencakup masalah (a) kesamaan Makna, (b) Kebalikan makna, (c) Ketercakupan makna dan (d) Keberlainan Makna. Makna leksikal ini yang akan dijadikan pijakan analisis data. Dari uraian yang disebutkan Chaer tersebut maka dapat dijelaskan hal-hal sbb:

- (a) **Kesamaan makna** atau kesinoniman, misalnya menyangkut masalah seberapa besar kesamaan makna yang terdapat antara dua buah kata atau lebih: sebab seperti kita tahu, tidak pernah ditemukan dua buah kata dalam bahasa Indonesia yang kesamaan maknanya bersifat mutlak atau

seratus persen. Umpamanya kata *ayah* dan *bapak* kesamaanya dianggap cukup; tetapi toh masih terdapat keberbedaannya, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh kalimat berikut:

Bapak }
 Si Badu orang Medan
 Ayah }

“Bapak” }
 Mau ke mana?” tanya adik.
 “ayah” }

“Selamat pagi { Bapak } Mukti!” seru anak-anak di sekolah itu
 { *Ayah }

(b) **Kebalikan Makna** atau keantoniman, misalnya menyangkut masalah mengapa kata *hidup* dan *mati* yang berantonim tidak bisa dikatakan *sangat hidup* dan *sangat mati*, tetapi pada kata *jauh* dan *dekat* yang juga berantonim dapat dikatakan *sangat jauh* dan *sangat dekat*. Juga mengapa kata *tinggi* hanya berantonim dengan kata *rendah*; sedangkan kata *berdiri* bisa berantonim dengan kata *duduk*, dengan kata *berbaring*, dengan kata *tiarap* dan dengan kata *berjongkok*. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat tipe-tipe keantoniman dalam bahasa Indonesia.

(c) **Ketercakupan Makna** atau kehiponiman dan kehiperniman berkenaan dengan adanya fakta bahwa ada kata-kata yang tercakup di bawah

makna kata lain, seperti kata *cekalang* yang tercakup di bawah makna *ikan* dan kata *bemo* yang tercakup maknanya di bawah kata *kendaraan*. Lalu di samping itu adanya fakta bahwa ada kata-kata yang maknanya mencakup makna sejumlah kata lain, seperti kata *bunga* yang maknanya mencakup makna kata-kata *melati*, *seruni*, *mawar*, *cempaka*, *kenanga*, dan lain-lain; atau juga kata *bangunan* yang maknanya mencakup makna kata *rumah*, *jembatan*, *bendungan*, *menara* dan lain-lain. Kemudian ada lagi fakta adanya kata yang bukan maknanya mencakup sejumlah kata lain, melainkan mencakup sejumlah kata yang merupakan bagian (komponen) dari kata tersebut. Umpamanya kata *rumah* mencakup didalamnya kata *kamar*, *dapur*, *gudang*, *kamar mandi*, dan lain-lain. Di sini kita lihat kasus *rumah* dengan bagian-bagiannya ini tidak sama dengan kasus *bunga* dengan *melati*, *cempaka* dan sebagainya itu.

- (d) **Keberlainan Makna** antara dua butir leksikal berkenaan dengan adanya fakta bahwa ada kata-kata yang bentuknya sama, tetapi maknanya sangat berlainan. Misalnya kata *pacar* dalam kalimat, “ *Pulang dari Mekah biasanya jema'ah haji membawa pacar*”, bermakna ‘inai’, pemerah kuku’; sedangkan dalam kalimat, “Si Joni mengajak pacarnya menonton Bioskop”, bermakna ‘kekasih’; Contoh lain kata *baku* dalam kalimat “*Baku tembak terjadi antara polisi dan perampok*” bermakna *saling tembak*; sedangkan dalam kalimat “*Kapas adalah bahan baku tekstil*” bermakna ‘*bahan mentah*’ atau ‘*bahan utama*’.

Landasan Teori semantik leksikal yang digunakan untuk analisis adalah teori yang diungkapkan oleh Chaer karena penulis menganggap teori ini telah mencakup teori-teori lain dalam menjelaskan teori semantik leksikal. Dalam teori semantik leksikal, Chaer membagi menjadi empat yaitu, kesamaan makna, kebalikan makna, ketercakupan makna dan keberlainan makna.

2. Teori Ideologi Bahasa

Language relativism can be associated with two major conceptions: that “each language has or is a particular spirit” and that each language has or is a real or imagined-territory.” Spirituality and territoriality combined give rise to the ideology of a language as a realm (Moschonas, 2004: 173).

Relativitas bahasa menjadikan ideologi bahasa sebagai bidangnya. Dalam hal ini, Moschonas menyebutkan dua konsep utama, yaitu spiritual dan wilayah, sebagai batasan ideologi bahasa. Sementara Hodge (1993:6) memperjelas ideologi bahasa dengan,

But language, typically, is immersed in the ongoing life of a society, as the practical consciousness of that society. This consciousness is inevitably a partial and false consciousness. We can call it ideology, defining ‘ideology’ as a systematic body of ideas, organized from a particular point of view. Ideology is thus a subsuming category which includes sciences and metaphysics, as well as political ideologies of various kinds, without implying anything about their status and reliability as guides to reality.

Bahasa merupakan sesuatu yang menyatu dalam kehidupan yang sedang berlangsung sebagai kesadaran nyata masyarakat.

Kesadaran yang dapat berupa kesalahan sebagian atau seluruhnya. Kesadaran ini disebut ideologi, yang didefinisikan sebagai kerangka ide yang sistematis tersusun dari sudut pandang tertentu. Ideologi tergolong kategori ilmu dan sesuatu yang tidak tampak seperti berbagai jenis ideologi politik, tanpa menyatakan sesuatu secara tidak langsung tentang keadaan dan keyakinan sebagai arah menuju kenyataan. Simpson (1992:181) mempertegas dengan *Language is a form of social control and that textual analysis is the 'analysis of ideologically loaded structures and meanings*. Analisis teks adalah analisis arti dan tata bahasa yang berisikan ideologi.

Posisi Neutral dan Critical dijadikan sarana untuk mengevaluasi bahasa (Woolard dan Schieffelin, 1994: 57). Pihak netral dipakai untuk memperjelas pihak pro dan kontra terhadap ide khilafah. Pihak *critical*-lah yang akan mempertajam posisi pihak *pro-critical* (+) atau posisi pihak *contra-critical* (-). Sementara itu, Woolard dan Schieffelin (1994: 54) melanjutkan bahwa *Sets of beliefs about language articulated by users as rationalization or justification of perceived language structure and use*. Keyakinan, *beliefs*, tentang bahasa yang dituturkan menjadi seperangkat alat untuk menguji struktur dan penggunaan bahasa, sehingga keyakinan, *beliefs*, bila dikaitkan dengan pendapat Moschonas dapat dikategorikan dalam spiritualitas.

Simpson (1993: 5) menambahkan bahwa *An ideology therefore derives from the-taken-for-granted assumptions, beliefs and value systems which are shared collectively by social groups.* Ideologi itu berasal dari asumsi yang selalu pasti membenarkan, keyakinan dan sistem nilai yang terdapat pada kelompok masyarakat.

Sementara itu, Hornby (1989:616) menyatakan bahwa *Ideology is set of ideas that form the basis of an economic or political theory or that are held by a particular group or person.* Ideologi merupakan seperangkat ide yang membentuk dasar teori politik atau ekonomi yang diemban oleh kelompok atau orang tertentu.

Berdasarkan teori-teori ideologi bahasa dapat diambil pengertian bahwa ideologi bahasa adalah kombinasi antara spiritualitas (*spirituality*) – keyakinan (*beliefs*) dan wilayah (*territoriality*) yang memunculkan kekuatan (*power*) sehingga muncul pula pihak yang merasa tertindas yang dapat diposisikan sebagai pihak *critical* (-) sedangkan posisi penindas selalu pada pihak *critical* (+). Posisi pihak *netral* sebagai pihak yang tidak memiliki pilihan, sehingga ekosistem ini dapat dijadikan realitas linguistik (*linguistics relativity*) sebagai dasar ideologi bahasa (*linguistics ideology*).

3. Khilafah

a. Pengertian Bahasa

Khilafah (khilāfah) merupakan *mashdar* (bentuk dasar) dari *fi'il madhi khalafa* (verba lampau) , berarti menggantikan atau

menempati tempatnya (Munawwir, 1984:390). Hornby (1989: 160) menyebutkan, *Caliph is title formerly used by Muslim rulers who were successors of Muhammad or chief civil and religious ruler in certain Muslim countries. Caliphate is position, reign or territory of a caliph.* Demikian pula Zallum (2002:31) menambahkan, Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara' (Zallum, 2002:53).

Khalifah adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan tempatnya (*ja'a ba'dahu fa shara makanah*) (Anis, 1972:251). Dalam kitab *Mu'jam Maqayis al-lughah* (II/210) dinyatakan, khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam Ath-Thabari (1970:199), makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa *as-sulthan al-a'zham* (pemimpin besar ummat Islam) disebut sebagai *khalifah*, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya.

b. Pengertian Syari'at

Dalam pengertian syariat, khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi SAW. Dalam kepemimpinan negara Islam (*ad-daulah al-islamiyyah*) (Al-Baghdadi, 1995:20). Inilah

pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah khilafah digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri (Al-Khalidi, 1980:226). Pemahaman ini telah menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih *siyasah* ketika mereka berbicara tentang *khilafah* atau *imamah*. Para ulama salaf telah membahas konsep negara Islam atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah *khilafah/imamah* atau istilah *dar al-islam* (Ath-Thamawi, 1967:245 dan Az-Zuhaili, 823).

Al-Khalidi (1980), Belhaj (1991), dan Al-Baghdadi (1995) telah menghimpun berbagai definisi khilafah yang telah dirumuskan oleh para ulama diantaranya:

- (1) Al-Kamal ibn Al-Humam dalam Al-Khalidi (1980:141) : Khilafah adalah otoritas (*istihqaq*) pengaturan umum atas kaum Muslimin.
- (2) Al-Qalqasyandi dalam Al-Khalidi (1980:8) : Khilafah adalah kekuasaan umum (*wilayah 'ammah*) atas seluruh ummat, pelaksanaan urusan-urusan umat. Serta pemikulan tugas-tugasnya.
- (3) At-Taftazani dalam Belhaj (1991:603) : Khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi SAW dalam penegakan agama, pemeliharaan hak-hak ummat, yang wajib ditaati oleh seluruh ummat. Hal ini diperkuat juga oleh Ridha (1964:10).

- (4) Imam Al-Mawardi dalam Belhaj (1991:3): Imamah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia.
- (5) Dr. Hasan Ibrahim Hasan dalam Belhaj (1991: 350): Khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan-urusan agama dan dunia sebagai pengganti dari Nabi SAW.
- (6) Ibn Khaldun dalam Al-Baghdadi (1995:166&190): Khilafah adalah pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syari'at dalam berbagai kemaslahatan mereka, baik ukhrawi maupun duniawi, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawi.
- (7) 'Adhuddin al-Iji dalam Al-Baghdadi (1995:32): Khilafah adalah kepemimpinan umum (*riyasaḥ ammah*) dalam urusan-urusan dunia dan agama, dan lebih utama disebut sebagai pengganti Rasullulah dalam penegakan agama.
- (8) Imam al-Juwayni dalam Al-Baghdadi (1995:15): Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh (*riyasaḥ tammah*) sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam berbagai kepentingan agama dan dunia.

c. Analisis Definisi

Berbagai definisi di atas dapat dibagi menjadi tiga kategori definisi, yaitu:

- (1) Definisi yang lebih menekankan pada penampakan agama (*al-mazhar ad-dini*).
- (2) Definisi yang lebih menekankan pada penampakan politik (*al-mazhar as-siyasi*)
- (3) Definisi yang berusaha menggabungkan penampakan agama (*al-mazhar ad-dini*) dan penampakan politik (*al-mazhar as-siyasi*)

Semua definisi di atas sebenarnya lebih mendeskripsikan realitas empirik Khilafah – misalnya adanya dikotomi wilayah “urusan dunia” dan “urusan agama” – daripada sebuah definisi yang bersifat syar’i, yang diturunkan dari nash-nash syari’at.

Nash-nash syari’at khususnya hadits-hadits Nabi SAW, telah menggunakan istilah *khalifah* dan *imam* yang masih satu akar kata dengan kata *khilafah/imamah*. Imam al-Bukhari dalam Shahih-nya telah mengumpulkan hadits-hadits tentang khilafah dalam kitab Al-Ahkam. Imam Muslim dalam Shahih-nya telah mengumpulkannya dalam kitab Al-Imarah (Belhaj, 1991:15). Dengan demikian istilah khilafah merupakan istilah syar’i yang definisinya harus digali dari nash.

Dengan menelaah nash-nash Al-Qur’an dan Hadits tersebut, akan kita jumpai bahwa definisi khilafah dapat dicari rujukannya pada 2 (dua) kelompok nash, yaitu:

Kelompok Pertama: Nash-nash yang menerangkan hakikat Khilafah sebagai sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia misalnya hadis berikut:

Imam yang (memimpin) atas manusia adalah bagaikan seorang penggembala dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya (rakyatnya). (Shahih Muslim, XII/213; Sunan Abu Dawud no. 2928, III/342-343; Sunan At-Tismidzi, no.1705, IV/308).

Ini menunjukkan bahwa Khilafah adalah sebuah kepemimpinan (*ri'asah/qiyadah/imarah*). Adapun yang menunjukkan bahwa Khilafah bersifat umum untuk seluruh kaum muslim di dunia, misalnya hadis berikut: Jika dibaiat dua orang khalifah bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (Shahih Muslim, no. 1853)

Ini berarti, seluruh kaum Muslim di dunia hanya boleh dipimpin seorang Khalifah saja, tak boleh lebih. Ini telah disepakati oleh empat imam mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, rahimahumullah (Al-Jaziri, 1999:308; Ad-Dimasyqi, 1996:208).

Kelompok kedua, nash-nash yang menjelaskan tugas-tugas khalifah, yang secara lebih rinci terdiri dari dua tugas sebagai berikut:

Pertama, tugas khalifah menerapkan seluruh hukum syari'ah Islam atas seluruh rakyat. Hal ini tampak dalam berbagai nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mengatur mu'amalat dan urusan harta benda antara individu muslim (Q.S. Al-Baqarah (2): 188; Q.S. an-Nisa' (4):58), mengumpulkan dan membagikan zakat (Q.S. at-Taubah (9):103), menegakkan hudud (Q.S. al-Baqarah (2):179),

menjaga akhlak (Q.S. al-Isra' (17):32), menjamin masyarakat dapat menegakkan syiar-syiar Islam dan menjalankan berbagai ibadah (Q.S. al-Hajj (22):32), dan seterusnya.

Kedua, tugas Khalifah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jihad fi sabilillah. Hal ini tampak dalam banyak nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mempersiapkan pasukan perang untuk berjihad (Q.S. al-Baqarah (2):216), menjaga perbatasan negara (Q.S. al-Anfal (8):60) memantapkan hubungan dengan berbagai negara menurut asas yang dituntut oleh politik luar negeri, misalnya: mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, perjanjian gencatan senjata, perjanjian bertetangga baik, dan semisalnya (Q.S. al-Anfal (8):61; Q.S. Muhammad (47):35).

Berdasarkan dua kelompok nash inilah, dapat dirumuskan definisi Khilafah secara lebih mendalam dan lebih tepat. Intinya, Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum Muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Definisi inilah yang telah dirumuskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab-kitabnya, misalnya kitab *Al-Khilafah* (hlm.1), *Muqaddimah ad-Dustur* (bab Khilafah, hlm.128), dan *Asy-Syaksiyah al-Islamiyah* (Juz II, hlm.9). Menurut beliau juga, istilah Khilafah juga dan Imamah dalam hadits-hadits sahih maknanya sama saja menurut pengertian syari'at (madlul syar'i). Definisi inilah

yang selayaknya diambil dan diperjuangkan agar terealisasi di muka bumi.

4. Perbedaan Kajian

Kajian tentang ideologi bahasa dapat dibahas dalam beberapa kajian atau sub-kajian. Hal ini menunjukkan ideologi bahasa memiliki banyak sisi yang dapat digali sebagai sumber penelitian dengan sudut pandang kajian yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, ideologi bahasa akan dikaji dari sudut pandang antropologi linguistik. Dengan batasan pengertian yang diungkapkan oleh Foley (2002,3) *Anthropological linguistics is the sub-field of linguistics which is concerned with the place of language in its wider social and cultural context, its role in forging and sustaining cultural practices and social structures.*

Aspek yang membedakan kajian antropolinguistik terhadap ideologi bahasa dengan analisis wacana dan analisis framing dalam menganalisis ideologi dan bahasa adalah pada (1) Analisis wacana memandang ada tiga hal penting dalam menganalisis, yaitu tujuan komunikatif, struktur teks dan ciri-ciri kebahasaan. (2) Analisis framing membingkai satu topik bahasan dengan frame sebagai batasannya (3) Analisis antropolinguistik mengkaji melalui konteks budaya dan sosial yang lebih luas dengan peran untuk menempa dan menghasilkan praktek budaya serta struktur sosial.

Sementara kajian antropolinguistik dapat tumpang tindih dengan kajian sosiolinguistik. Masih menurut Foley (2002,3-4) perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Perbedaan	
	Antropolinguistik	Sosiolinguistik
01	Konsep inti antropologi	Konsep inti sosiologi
02	Budaya, pola tingkah laku kelompok masyarakat seperti adat istiadat dan cara hidup masyarakat	Lembaga sosial, yaitu terdiri dari individu dan kelompok yang membentuk interaksi sosial.
03	Membongkar makna melalui penggunaan bahasa, kesalahan penggunaan bahasa atau dibalik non-penggunaan bahasa	Menemukan bagaimana pola-pola tingkah laku bahasa dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat
04	Bentuk, register dan gaya bahasa yang berbeda	Perbedaan terkait dengan tingkah laku bahasa dengan variabel kelompok masyarakat, seperti umurnya, jenis kelaminnya, kelasnya, rasnya dsb.
05	Kajian disiplin penafsiran bahasa untuk memahami budaya	Kajian disiplin penafsiran bahasa untuk memahami masyarakat
06	Contoh: Pengucapan akhiran –ing dalam <i>running</i> dapat diucapkan [rʌnɪŋ] atau [rʌnɪn]. Pertanyaan mendasar: Apa yang dimaksud pembicara ketika mereka mengucapkan varian [ɪŋ] dibanding dengan varian [ɪn]. Tentu jawabannya akan berbeda dengan konteks yang berbeda. Namun satu jawaban yang mungkin adalah penggunaan varian [ɪn] untuk menunjukkan identitas diri sebagai kaum laki-laki yang kuat terkait dengan variabel kelas laki-laki dan kelas pekerja.	Contoh: Pengucapan akhiran –ing dalam <i>running</i> dapat diucapkan [rʌnɪŋ] atau [rʌnɪn]. Pendekatan variabelnya melalui pencatatan hubungan antara pengucapan dan kelompok masyarakat tertentu, misalnya Frekuensi pengucapan yang lebih tinggi untuk varian [ɪn] dilakukan oleh kaum laki-laki sedangkan [ɪŋ] dilakukan oleh kaum perempuan – ATAU- Varian [ɪn] dengan frekwensi yang lebih tinggi dilakukan oleh kelompok orang-orang dengan latar belakang kelas pekerja atau kelas rendah, sementara [ɪŋ] banyak diucapkan oleh kelompok orang dengan latar belakang kelas menengah ke atas.

Penelitian Antropologi Linguistik melalui leksikon-leksikon yang terdapat dalam ide khilafah terkait dengan latar belakang budaya bangsa

Indonesia yang berbeda dengan budaya bangsa Arab. Berdasarkan latar belakang budaya ini akan ditemukan makna leksikal dan ideologi bahasa yang tercakup dalam ide khilafah yang menjadi opini masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia, pada umumnya, sehingga ada sebagian masyarakat Indonesia pun menerjemahkan opini tentang ide khilafah dari berbagai tokoh dunia, laporan intelijen Amerika, majalah berbahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia. Melalui data-data ini, penulis akan mengungkap makna melalui penggunaan bahasa, kesalahan penggunaan bahasa, melalui leksikon-leksikon ide khilafah atau dibalik non-penggunaan bahasa, melalui budaya termasuk di dalamnya, adanya spiritulitas, wilayah, dan kekuatan. Ide khilafah memiliki bentuk, register dan gaya bahasa yang berbeda, sebab masyarakat Indonesia memiliki status sosial yang berbeda baik dari segi latar belakang pendidikan, jenis kelamin, maupun usia.

C. Hipotesis

Sistem khilafah sudah tidak diterapkan selama 84 tahun. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pergeseran makna di kalangan umat Islam sendiri. Umat Islam memaknai khilafah dengan berbeda-beda sehingga untuk mewujudkan kembali sistem khilafah diperlukan penyeragaman persepsi memaknai khilafah di kalangan umat Islam sendiri, khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya, sebab sistem Khilafah ada untuk menaungi seluruh manusia apapun agama dan golongannya. Ide khilafah dapat direkonstruksi dari leksikon-leksikon yang banyak dipakai dan menjadi icon/keywords dalam sistem khilafah.

BAB III

CARA PENELITIAN

A. Penyediaan Data

Data diperoleh dengan cara mengunduhnya melalui internet mulai tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 6 Januari 2008. Data berupa teks tertulis berupa opini mulai dari tokoh kenegaraan sampai dengan opini masyarakat, sedangkan data yang diperoleh dari hasil Survei Syariah 2008 yang disiapkan oleh SEM Institute dijadikan sebagai validasi data bahwa telah terjadi pergeseran makna khilafah yang disebabkan dari berbagai faktor. Faktor tersebut memperkuat adanya ideologi bahasa. Shari'ah Economic and Management (SEM) Institute di bawah Yayasan SEMI Jakarta, sebagai lembaga yang didedikasikan untuk melakukan berbagai upaya pengkajian terhadap gagasan ekonomi dan manajemen syariah, serta berusaha mendorong bagi aplikasinya di tengah masyarakat.

Metodologi Survei yang dilakukan oleh SEM Institute, metode sampling dan metode kontak. Metode Sampling yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif survei dengan menggunakan *quota purposive sampling* untuk non masyarakat umum, dan *stratified random sampling* untuk masyarakat umum, sedangkan, metode kontak yaitu wawancara langsung (*Face to face interview*) dengan memerlukan periode waktu survei adalah 26 Feb – 04 Maret 2008 dengan cakupan 26 kota di Indonesia.

Teori semantik digunakan untuk menjelaskan terjadinya pergeseran makna kata khilafah. Teori ideologi bahasa digunakan untuk menjelaskan adanya ideologi bahasa pada ide khilafah. Sesuai dengan definisi operasionalnya, Ideologi bahasa adalah kombinasi antara spiritualitas (*spirituality*) – keyakinan (*beliefs*) dan wilayah (*territoriality*) yang memunculkan kekuatan (*power*) sehingga muncul pula pihak yang merasa tertindas yang dapat diposisikan sebagai pihak critical (-) sedangkan posisi penindas selalu pada pihak critical (+). Posisi pihak netral sebagai pihak yang tidak memiliki pilihan. Sehingga ekosistem ini dapat dijadikan realitas linguistik (*linguistics relativity*) sebagai dasar ideologi bahasa (*linguistics ideology*).

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pendekatan ini dipergunakan untuk mengelola bahan dan data berdasarkan pada analisis interpretasi (penafsiran) objek. Guba dan Lincoln menjelaskan metode kualitatif memiliki karakteristik paradigma naturalistik (Lexy J. Moleong, 1999:15), relevan dengan objek yang diteliti, yaitu mengungkapkan terdapatnya ideologi bahasa pada opini kekinian terhadap ide khilafah.

Menurut Spradley penelitian kualitatif memiliki kecenderungan mempergunakan pola berbentuk siklus yaitu prosesnya dapat dilakukan berulang-ulang, membuat catatan mengenai data dan menganalisis data yang dikumpulkan (Lexy J.Moleong, 1999: 13).

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data dan Sumber Data

Data penelitian berupa teks tertulis yaitu terdiri atas data, objek penelitian dan sumber data. Data berupa teks yang ditulis oleh beberapa sumber tentang ide Khilafah. Objek penelitian berupa teks-teks yang bertemakan dan atau berjudul tentang pembahasan ide Khilafah. Sumber data diambil melalui beberapa alamat website yang diunduh dari google melalui mesin pencarian dengan menuliskan kata 'Khilafah'. Narasumber data ini adalah tokoh-tokoh kenegaraan dan atau masyarakat pada umumnya yang menuangkan idenya dalam bentuk tulisan berbahasa Indonesia. Kriteria narasumber mulai dari legislatif, yudikatif, eksekutif, militer dan kepolisian, kalangan profesional, ormas Islam, akademisi/pengamat, media masa, partai politik, pesantren, masyarakat umum dan LSM-LSM lainnya.

b. Cara Pemerolehan Data

Data diperoleh melalui media internet dengan cara mengunduhnya dari berbagai situs. Ide khilafah dibicarakan di beberapa situs internet sudah sejak lama. Komentar-komentar tentang ide khilafah baik yang pro maupun kontra dapat diunduh. Setelah data terkumpul, dipilah-pilah, dikelompokkan pada data komentar yang pro dan kontra terhadap ide khilafah. Berdasarkan keseluruhan data yang telah dikelompokkan tersebut, dipilah-pilah kembali untuk kemudian ditentukan asal usul

sumber komentar ide khilafah. Penentuan sumber asal komentar ide khilafah berdasarkan pada tiga ideologi besar dunia yaitu Islam, Kapitalis dan Sosialis. Pada ide Khilafah akan dirunut melau leksikon-leksikonnya tentang adanya spiritualitas, wilayah dan kekuatan. Dari sinilah akan tampak bahwa ide khilafah termasuk kajian ideologi bahasa.

B. Analisis Data

Terjadinya pergeseran makna dari kata ‘khilafah’ itu sendiri menunjukkan sebagai kajian antropologi ditinjau dari sudut pandang maksud pembicara ketika menggunakan kata ‘Khilafah’. Sedangkan terjadinya perubahan makna ‘khilafah’ melalui semantik merupakan kajian linguistik. Identifikasi ideologi khilafah dapat direkonstruksi dari leksikon yang menjadi ikon atau kata kunci dalam ajaran khilafah sebagaimana terdapat dalam teks / data. Kata Khilafah ini yang akan dianalisis melau makna leksikal dan adanya ideologi bahasa.

Istilah leksikon berasal dari bahasa Yunani Kuno *lexicon* yang berarti ‘kata’, ‘ucapan’, atau ‘cara berbicara’. Kata leksikon ini sekerabat dengan kata leksem, leksikografi, leksikograf, dan leksikal. Kata khilafah termasuk pada kata yang proses pembentukannya dapat ditelusuri melalui suatu proses. Merupakan istilah serapan asing yang sudah lama digunakan dan tetap digunakan, tidak perlu diubah lagi mengikuti buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.

Kata khilafah memiliki makna atau istilah jenis makna. Yang termasuk dalam makna kontekstual atau makna dalam penggunaan. Berdasarkan teori

de Saussure setiap kata (istilah de Saussure tanda linguistik) tentu memiliki makna sebagai komponen dari kata itu, di samping komponen bunyinya. Makna kata/leksikal ini merupakan makna yang secara inheren ada di dalam kata itu terlepas dari konteks apa pun.

Kata khilafah memiliki makna sebuah sistem kenegaraan yang berasaskan pada aqidah Islam untuk menerapkan syari'at-syari'at Islam di seluruh penjuru dunia. Secara konseptual menjadi kata kunci bagi perjuangan dalam rangka menegakkannya. Kata khilafah banyak mengalami penyempitan makna dari makna sebenarnya. Penafsir yang memberikan tafsiran kata berbeda dalam makna tekstual dan kontekstualnya dalam menyampaikan ide.

C. Penyajian Hasil Analisis Data

1. Makna leksikal

Faktor terjadinya perubahan makna dapat disebabkan oleh beberapa hal. Demikian pula wujud perubahan makna, seperti dipaparkan pada Bab sebelumnya. Secara umum makna leksikal mencakup:

- A. Kesamaan Makna
- B. Kebalikan Makna
- C. Ketercakupan Makna
- D. Keberlainan Makna.

Kemudian hasil analisis data akan divalidasi dengan hasil survey dari SEM – Institute.

2. Ideologi bahasa pada ide khilafah

Berdasarkan teori ideologi bahasa maka ideologi bahasa pada ide Khilafah dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Spiritualitas
- B. Territory
- C. Power
- D. Alasan Terjadinya Opini Pro-Kontra

Dua hal tersebut di atas akan dijadikan acuan pada bagian analisis data. Sehingga akan diketahui kata Khilafah yang merupakan ide, telah terjadi pergeseran makna atau tidak setelah masuk ke dalam kosa kata Bahasa Indonesia. Hasil analisis makna leksikal ini akan dikaitkan pada budaya masyarakat Indonesia dengan mengacu pada teori ideologi bahasa sehingga akan diperoleh bukti adanya ideologi bahasa. Berdasarkan temuan makna leksikal dan ideologi bahasa pada ide khilafah, akan dibuktikan bahwa telah terjadi pro-kontra terhadap opini tentang ide Khilafah.

BAB IV

KHILAFAH DAN IDE KHILAFAH

Khilafah dan ide khilafah perlu dijabarkan secara panjang lebar agar dapat diperoleh persamaan persepsi tentang kata Khilafah itu sendiri, baik dari segi sejarahnya maupun metode pengembalian ide menjadi sistem negara lagi. Relevansi Bab ini dalam analisis adalah agar terjadi kekonsistenan dalam memahami kata Khilafah yang ditemukan dalam data sehingga tetap sesuai dengan manfaat penelitian ini yaitu agar umat Islam kembali kepada makna dasar sehingga tidak terjadi perpecahan di antara kaum Muslim. Sedangkan terhadap ideologi bahasa, Bab ini memiliki relevansi yaitu baik dari segi sejarah hingga menjadi ide kembali, kata Khilafah memerlukan adanya spiritualitas, wilayah dan kekuatan yang tercakup dalam teori ideologi bahasa. Dari sinilah, penulis dapat merunut budaya yang melatarbelakangi munculnya ide Khilafah hingga berpengaruh ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dengan latar belakang budaya yang berbeda pula.

A. Sejarah Khilafah 622 – 1924

Ibn Ishaq berkata, “Orang-orang memeluk Islam secara bergelombang, baik laki-laki maupun wanita, sehingga berita tentang Islam tersebar luas di kota Makkah, dan Islam menjadi bahan pembicaraan. Setelah itu Allah ‘*Azza wa Jalla* memerintahkan Rasul-Nya menyampaikan Islam dan mengajak

manusia secara terang-terangan, menampakkan perintah Allah kepada manusia, sekaligus mengajak mereka kepada-Nya...”

Ibn Ishaq berkata lagi. “Lalu Allah Swt. berfirman kepada Rasulullah saw: Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. (QS al-Hijir [15]: 94). Allah Swt. juga berfirman:

Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah, “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan.” (QS asy-Syu’ara [26]: 214-216).

Tatkala Rasulullah saw. memperlihatkan Islam secara terang-terangan kepada kaumnya dan menampakkan perintah Allah kepada mereka secara terbuka, saat itu orang-orang Quraisy tidak mengutuk beliau dan tidak memberikan reaksi, kecuali ketika suatu saat beliau menyebut-nyebut tuhan-tuhan mereka dan menghinanya. Tatkala beliau melakukan hal itu, seketika mereka menjadikan persoalan tersebut sebagai persoalan yang besar; mereka menentanginya.” (Hisyam, 2000:274-276).

Ibn Ishaq menuturkan bahwa setelah para sahabat berhijrah ke Madinah, Rasulullah saw. masih tinggal di Makkah, menunggu hingga diizinkan berhijrah. Seluruh kaum Muhajirin telah berhijrah ke Madinah, kecuali para sahabat yang ditawan (oleh keluarga/sukunya, *pen.*) atau mengalami penyiksaan. Pengecualian lainnya adalah Ali bin Abu Thalib dan Abu Bakar bin Abu Quhafah.

Ibn Ishaq juga mengatakan bahwa Asma binti Abu Bakar r.a. bertutur:

’Tatkala Rasulullah saw. dan Abu Bakar telah berangkat, beberapa orang Quraisy mendatangi rumah kami, termasuk Abu Jahal. Mereka berdiri di pintu rumah Abu Bakar, lalu aku pun menemui mereka. Mereka berkata, “Mana ayahmu, hai putri Abu Bakar?” Aku menjawab, “Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayahku pergi.” Abu Jahal mengangkat tangannya dan menampar pipiku hingga anting-antingku terlepas dari telingaku. Setelah itu mereka pergi dari rumahku.”

Ibn Ishaq juga menuturkan bahwa Abdurrahman bin Uwaym bin Sa’idah, sebagaimana dituturkan Muhammad bin Ja’far bin az-Zubair dari Urwah bin az-Zubair, berkata:

“Beberapa sahabat Rasulullah saw. yang berasal dari kaumku berkata, “Tatkala kami mendengar Rasulullah saw. telah pergi dari Makkah dan kedatangannya sudah semakin dekat, maka selesai shalat subuh kami berjalan keluar dari perkampungan untuk menunggu/menyambut kedatangan beliau. Demi Allah, kami tidak beranjak hingga terik matahari menyengat. Apabila kami tidak menjumpai tempat untuk berteduh, kami pun masuk ke dalam rumah. Pada hari kedatangan Rasulullah saw., kami juga menunggu sebagaimana hari-hari sebelumnya. Tatkala kami tidak menjumpai tempat untuk berteduh, kami masuk ke rumah masing-masing. Rasulullah saw. datang ketika kami telah masuk ke rumah masing-masing. Orang yang pertama kali melihat kedatangan beliau adalah salah seorang Yahudi. Ia pernah menyaksikan apa yang kami lakukan, yakni menunggu (kedatangan Rasulullah saw. pada hari-hari sebelumnya, *pen.*). Orang Yahudi itu berteriak dengan suara keras, “Wahai Bani Qailah (Anshar)! Ini dia kakek kalian telah datang menuju kalian.”

Kami pun bergegas keluar rumah untuk menyambut Rasulullah saw. yang saat itu tengah berteduh di bawah pohon kurma ditemani oleh Abu Bakar yang seusia dengan beliau. Kaum Anshar lalu berkerumun di sekitar Rasulullah saw. Mereka tidak bisa membedakan yang mana Rasulullah saw. dan yang mana Abu Bakar. Tatkala tempat tersebut tidak bisa lagi menaungi Rasulullah saw., maka Abu Bakar berdiri dan memayungi Rasulullah saw. dengan bajunya. Saat itulah kami baru mengetahui yang mana Rasulullah saw.

a. Pelajaran dari Hijrah Rasulullah Saw.

Banyak yang menganggap bahwa hijrahnya Rasulullah saw. dan kaum muslimin dari kota Makkah ke Madinah adalah sebuah eksodus (pelarian); menghindar dari kekejaman, penganiayaan, dan pembunuhan orang-orang Quraisy yang dilakukan secara sistematis terhadap Rasulullah saw. dan para pengikutnya. Hijrah Rasulullah saw. dan kaum Muslim dari Makkah ke Madinah sangat berbeda latar belakang dan tujuannya dengan hijrahnya sebagian kaum Muslim ke Habsyah, yang pernah dilakukan mereka pada masa sebelumnya. Anggapan atau tuduhan bahwa hijrahnya Rasulullah Saw. dan kaum muslimin ke Madinah itu tindakan eksodus lantaran takut dibunuh oleh kaum Quraisy sama sekali tidak benar. Sebab Rasulullah Saw. tidak pernah menghitung kematian dalam menempuh jalan dakwah. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan kaum muslimin yang merupakan perintah Allah Swt. kepada mereka adalah demi dakwah Islam dan tegaknya Daulah Islamiyah. Justru orang-orang Quraisy bersekongkol untuk membunuh Rasulullah lantaran takut Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. (An-Nabhani, 2006:47).

Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah dengan sendirinya menuntut pengorbanan yang sangat besar. Banyak di antara mereka yang terpaksa meninggalkan perniagaannya di Kota Makkah; tidak sedikit kaum Muhajirin yang terpaksa meninggalkan suami atau istrinya yang masih tetap kafir, atau bahkan anak-anak, orangtua dan keluarga/sukunya; banyak pula yang

meninggalkan rumah tempat kediamannya. Yang tidak sanggup pergi berhijrah karena ditawan oleh keluarga atau kabilahnya, atau dihalang-halangi oleh majikannya juga dituntut untuk berkorban. Ibn Ishaq berkata, “Kaum Muslim Makkah yang tidak sanggup berhijrah pasti ia disiksa atau ditawan oleh orang-orang Quraisy.” (Hisyâm, 2001:116).

Begitulah kondisi Rasulullah Saw. dan kaum Muslim Muhajirin, mereka mengorbankan apapun yang dimilikinya, semata-mata untuk menunaikan perintah Allah Swt. dan meraih keridhaan-Nya. Di samping itu mereka melihat harapan baru bagi tumbuhnya Islam di Madinah yang kondusif.

Sejarah pertumbuhan Islam telah menjelaskan bahwa hijrah merupakan garis batas pemisah antara fase dakwah kepada Islam dengan fase mewujudkan masyarakat dan negara yang menjalankan pemerintahan dengan Islam dan menerapkan hukum syariatnya. Batas antara dakwah menggunakan dalil dan argumentasi dengan kekuatan negara yang melindungi dakwah dari berbagai kekuatan jahat. (An-Nabhani, 2006: 47).

Setibanya Rasulullah Saw. di Madinah, sambutan kaum Muslim Anshar sangat antusias. Berhari-hari kaum Muslim Anshar rela menanti Rasulullah Saw. di luar kota Madinah, rela berpanas-panas di bawah terik matahari. Hal itu merupakan ungkapan kecintaan mereka terhadap Rasulullah Saw., serta konsekuensi dari perjanjian mereka dengan Rasulullah Saw. (dalam Baiat Aqabah II) yang mengharuskan mereka (kaum Anshar) untuk menjaga dan melindungi Rasulullah Saw. Kecintaan mereka terhadap

Rasulullah Saw. melebihi kecintaan mereka terhadap harta kekayaan mereka, anak, istri, dan keluarga mereka; bahkan terhadap jiwa mereka sekalipun.

Meskipun demikian, kecintaan kepada Rasulullah Saw. tidak semata diwujudkan hanya dengan menyambutnya dengan perasaan was-was dan gembira. Akan tetapi, lebih dari itu, kecintaan kepada Rasulullah Saw. harus disertai dengan mengikuti dan menjalankan amal perbuatan Rasulullah Saw. yang telah ditaklifkan (dibebankan/diwajibkan) kepada kaum Muslim, termasuk mengikuti *manhaj* Nabi saw. di dalam berdakwah. Itulah yang dilakukan sahabat Muhajirin dan Anshor.

b. Jejak Khilafah Dan Syari'at Islam Di Indonesia

Tegaknya syariat Islam tidak lepas dari keberadaan penguasa kaum Muslim yang menerapkan hukum Islam, menjaga akidah Islam, melindungi kepentingan umat Islam, dan melakukan dakwah Islam. Penguasa tersebut sering disebut sebagai khalifah dan imamah.

Terlepas dari soal penamaan ini, penguasa kaum Muslim pada dasarnya adalah penguasa otoritatif yang diakui keberadaannya oleh kaum Muslim; mereka menjaga dan membela kaum Muslim dari berbagai pihak yang mencoba mengganggu eksistensi kaum Muslim serta memelihara kaum Muslim sedunia.

Para ahli sejarah mengakui, Kekhilafahan Islam itu memang ada dan menjadi kekuatan politik real umat Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, di

belahan Barat Asia muncul kekuatan politik yang mempersatukan umat Islam dari Spanyol sampai Sindh di bawah Kekhilafahan Bani Umayyah (660-749 M), dilanjutkan oleh Kekhilafahan Abbasiyah kurang lebih satu abad (750-870 M), serta Kekhilafahan Utsmaniyah sampai 1924 M.

Adanya kekuatan politik di Asia Barat yang berhadapan dengan Cina telah mendorong tumbuh dan berkembangnya perdagangan di Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia (Tjandrasasmita, 2000:29). Hal ini dengan sendirinya memberi dampak bagi penyebaran Islam dan tumbuhnya kekuatan ekonomi, karena banyaknya pendakwah Islam yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang.

Secara faktual, pada abad 16 dan 17, umat Islam di Kepulauan Nusantara sedang menghadapi serangan penjajah asing, khususnya Portugis dan Belanda. Kedatangan Portugis, sebagaimana diketahui, memiliki tujuan: merampas kekayaan umat Islam (*gold*), menjalankan tugas suci kristenisasi (*gospel*), dan melakukan pembalasan terhadap kaum Muslim yang telah menduduki Spanyol dan Portugal sejak zaman Kekhilafahan Bani Umayyah (*glory*). Portugis ingin mewujudkan dominasi militer terhadap komunitas umat Islam (Tjandrasasmita, 2000:9)

Bertolak dari fakta-fakta inilah, penulis melihat adanya hubungan antara Kekhilafahan Islam dan para Sultan di Kepulauan Nusantara.

1. Dua Pucuk Surat Pengakuan

Pengaruh keberadaan Khilafah Islam terhadap kehidupan politik Nusantara sudah terasa sejak masa-masa awal berdirinya Daulah Islam. Keberhasilan umat Islam melakukan penaklukan (*futûhât*) terhadap Kerajaan Persia serta menduduki sebagian besar wilayah Romawi Timur, seperti Mesir, Syria, dan Palestina di bawah kepemimpinan Umar bin al-Khaththab telah menempatkan Khilafah Islam sebagai *superpower* dunia sejak abad ke-7 M.

Ketika kekhilafahan berada di tangan Bani Umayyah (660-749 M), penguasa di Nusantara—yang masih beragama Hindu sekalipun—mengakui kebesaran Khilafah.

Pengakuan terhadap kebesaran Khilafah dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya kepada Khalifah masa Bani Umayyah. Surat pertama dikirim kepada Muawiyah dan surat kedua dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz (Tjandrasasmita, 2000:32). Surat pertama ditemukan dalam sebuah *diwan* (arsip, *pen.*) Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umair yang disampaikan kepada Abu Ya'yub ats-Tsaqafi, yang kemudian disampaikan kepada Haitsam bin Adi. Al-Jahizh yang mendengar surat itu dari Haitsam menceritakan pendahuluan surat itu sebagai berikut:

Dari Raja al-Hind yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah, yang istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja, dan yang memiliki dua sungai besar yang mengairi pohon *gaharu*, kepada Muawiyah.... (Azra, 2004:27-28)

Surat kedua didokumentasikan oleh Abd Rabbih (246-329/860-940) dalam karyanya, *Al-Iqd al-Farîd*. Potongan surat tersebut ialah sebagai berikut:

Dari Raja Diraja..., yang adalah keturunan seribu raja... kepada Raja Arab (Umar bin Abdul Aziz) yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya hukum-hukumnya (Azra, 2004:28)

Ibnu Tighribirdi, yang juga mengutip surat ini dalam karyanya, *An-Nujûm azh-Zhâhirah fî Mulûk Mishr wa al-Qâhirah*, memberikan kalimat tambahan pada akhir surat ini, yakni, "Saya mengirimkan hadiah kepada Anda berupa bahan wewangian, sawo, kemenyan, dan kapur barus. Terimalah hadiah itu, karena saya adalah saudara Anda dalam Islam." (Azra, 2004:29)

Namun demikian, sekalipun ada kalimat, "Saudara Anda dalam Islam," belum ada indikasi Maharaja Sriwijaya memeluk Islam. Maharaja yang berkuasa pada masa itu ialah Sri Indravarman, yang disebut sumber-sumber Cina sebagai *Shih-li-t'o-pa-mo*. Nama ini mengisyaratkan bahwa ia belum menjadi pemeluk Islam. (Azra, 2004:29)

2. Sultan Rum, *Khâdim al-Haramayn*

Munculnya Kekhilafahan Islam Turki Utsmani, terutama setelah berhasil melakukan penaklukan atas Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur pada 857H / 1453M, menyebabkan nama Turki melekat di hati umat Islam Nusantara. Nama yang terkenal bagi Turki di Nusantara ialah "Sultan Rum." (Tjandrasasmita, 2000:47).

Sebelum kebangkitan Turki Utsmani, istilah *Rum* mengacu pada Byzantium, dan kadang-kadang juga pada Kerajaan Romawi. Akan tetapi,

setelah kemunculan Turki Utsmani, istilah *Rum* beredar untuk menyebut Kesultanan Turki Utsmani. Mulai masa ini, supremasi politik dan kultural Rum (Turki Utsmani) menyebar ke berbagai wilayah Dunia Muslim, termasuk ke Nusantara. (Azra, 2004:36)

Kekuatan politik dan militer Kekhilafahan Turki Utsmani mulai terasa di kawasan Lautan India pada awal abad ke-16. Sebagai penguasa kaum Muslim, Khalifah Turki Utsmani memiliki posisi sebagai *khâdim al-Haramayn* (penjaga dua tanah haram, yakni Makkah dan Madinah). Pada posisi ini, para penguasa Turki Utsmani mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin keamanan bagi perjalanan haji. Seluruh rute haji di wilayah kekuasaan Utsmani di tempatkan di bawah kontrolnya. Kafilah haji dengan sendirinya dapat langsung menuju Makkah tanpa hambatan berarti atau rasa takut menghadapi gangguan Portugis.

Pada tahun 954H / 1538M, Sultan Sulaiman I (berkuasa 928H / 1520M - 66) melepas armada yang tangguh di bawah komando Gubernur Mesir, Khadim Sulaiman Pasya, untuk membebaskan semua pelabuhan yang dikuasai Portugis guna mengamankan pelayaran haji ke Jeddah (Azra, 2004:38)

Turki Utsmani juga mengamankan rute haji dari wilayah sebelah Barat Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudera Hindia. Kehadiran angkatan laut Utsmani di Lautan Hindia setelah 904H / 1498M tidak hanya mengamankan perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara, tetapi juga mengakibatkan semakin besarnya saham Turki

dalam perdagangan di kawasan ini. Pada gilirannya, hal ini memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi sebagai dampak sampingan perjalanan ibadah haji.

Pada saat yang sama, Portugis juga meningkatkan kehadiran armadanya di Lautan India, tetapi angkatan laut Utsmani mampu menegakkan supremasinya di kawasan Teluk Persia, Laut Merah, dan Lautan India sepanjang abad ke-16 (Azra, 2004:36).

Dalam kaitan dengan pengamanan rute haji, Selman Reis (w 936H / 1528M), laksamana Turki di Laut Merah, terus memantau gerak maju pasukan Portugis di Lautan Hindia, dan melaporkannya ke pusat pemerintahan Khilafah di Istanbul. Salah satu bunyi laporan yang dikutip Obazan ialah sebagai berikut:

(Portugis) juga menguasai pelabuhan (Pasai) di pulau besar yang disebut Syamatirah (Sumatera)...Dikatakan, mereka mempunyai 200 orang kafir di sana (Pasai). Dengan 200 orang kafir, mereka juga menguasai pelabuhan Malaka yang berhadapan dengan Sumatera Karena itu, ketika kapal-kapal kita sudah siap dan, insya Allah, bergerak melawan mereka, maka kehancuran total mereka tidak terelakkan lagi, karena satu benteng tidak bisa menyokong yang lain, dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan yang bersatu. (Azra, 2004:40-41)

Laporan ini memang cukup beralasan, karena pada tahun 941 H / 1534M, sebuah skuadron Portugis yang dikomandoi Diego da Silveira menghadang sejumlah kapal asal Gujarat dan Aceh di lepas Selat Bab el-Mandeb pada Mulut Laut Merah.

3. Membebaskan Malaka dan Menaklukan Daerah Batak

Sebagaimana disebutkan dalam berbagai buku sejarah, Semenanjung Malaka diduduki oleh Bangsa Portugis pada Abad ke-16, hal ini pun menjadi perhatian Turki Utsmani.

Pada tahun 925H / 1519M, Portugis di Malaka gempar oleh kabar tentang pelepasan armada Utsmani untuk membebaskan kaum muslimin Malaka dari penjajahan kafir. Kabar ini, tentunya, sangat menggembirakan kaum muslimin setempat (Azra, 2004:41)

Ketika Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar naik tahta Aceh pada tahun 943H / 1537M, ia menyadari kebutuhan Aceh untuk meminta bantuan militer kepada Turki, bukan hanya untuk mengusir Portugis di Malaka, tetapi juga untuk melakukan *futûhât* ke wilayah-wilayah yang lain, khususnya daerah pedalaman Sumatera, seperti daerah Batak. Al-Qahhar menggunakan pasukan Turki, Arab, dan Abesinia (Pusponegoro, 1984:33). Pasukan Turki terdiri dari 160 orang, ditambah 200 orang tentara dari Malabar. Mereka membentuk kelompok elit angkatan bersenjata Aceh. Selanjutnya Al-Qahhar dikirim untuk menaklukkan wilayah Batak di pedalaman Sumatera pada 946H / 1539M.

Mendez Pinto, yang mengamati perang antara pasukan Aceh dan Batak, melaporkan kembalinya armada Aceh di bawah komando seorang Turki bernama Hamid Khan, keponakan Pasya Utsmani di Kairo (Azra, 2004:42)

Seorang sejarawan Universitas Kebangsaan Malaysia, Lukman Thaib, mengakui adanya bantuan Turki Utsmani untuk melakukan *fitûhât* terhadap wilayah sekitar Aceh. Menurut Thaib, hal ini merupakan ekspresi solidaritas umat Islam yang memungkinkan bagi Turki melakukan serangan langsung terhadap wilayah sekitar Aceh (Thaib, 2000:106)

Demikianlah, hubungan Aceh dengan Turki sangat dekat. Aceh seakan-akan merupakan bagian dari wilayah Turki. Persoalan umat Islam Aceh dianggap Turki sebagai persoalan dalam negeri yang harus segera diselesaikan.

Nuruddin ar-Raniri, dalam *Bustân as-Salâthîn*, meriwayatkan, bahwa Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar mengirim utusan ke Istanbul untuk menghadap 'Sultan Rum'. Utusan ini bernama Husain Effendi yang fasih berbahasa Arab. Ia datang ke Turki setelah menunaikan ibadah haji (Ambary, et al.: 53). Pada Juni 1562, utusan Aceh tersebut tiba di Istanbul untuk meminta bantuan militer Utsmani guna menghadapi Portugis. Ketika duta itu berhasil lolos dari serangan Portugis dan sampai di Istanbul, ia berhasil mendapat bantuan Turki, yang menolong Aceh membangkitkan kebesaran militernya sehingga memadai untuk menaklukkan Aru dan Johor pada 973H / 1564M (Azra, 2004:43-44)

4. Khalifah dan Gubernurnya di Aceh

Berkaitan dengan utusan Aceh tersebut, Farooqi menemukan sebuah arsip Utsmani yang berisi sebuah petisi dari Sultan Alauddin

Riayat Syah kepada Sultan Sulaiman al-Qanuni yang dibawa Husain Effendi. Dalam surat tersebut, Aceh mengakui penguasa Utsmani sebagai Khalifah Islam. Selain itu, surat ini melaporkan tentang aktivitas militer Portugis yang menimbulkan masalah besar terhadap para pedagang Muslim dan jamaah haji dalam perjalanan ke Makkah. Karena itu, bantuan Utsmani sangat mendesak untuk menyelamatkan kaum Muslim yang terus dibantai *Farangi* (Portugis) kafir (Azra, 2004:44)

Khalifah Sulaiman al-Qanuni wafat tahun 974H / 1566M. Akan tetapi, petisi Aceh mendapat dukungan Sultan Salim II (974H-82 / 1566M-74), yang mengeluarkan perintah Kekhilafahan untuk melakukan ekspedisi besar militer ke Aceh. Sekitar September 975H / 1567M, Laksamana Turki di Suez, Kurtoglu Hizir Reis, diperintahkan berlayar menuju Aceh dengan sejumlah ahli senapan api, tentara, dan artileri. Pasukan ini diperintahkan berada di Aceh selama masih dibutuhkan oleh Sultan (Ambary, et.al. : 54)

Namun, dalam perjalanan, armada besar ini hanya sebagian yang sampai di Aceh karena dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman yang berakhir pada tahun 979H / 1571M (Azra, 2004:44). Menurut catatan sejarah, pasukan Turki yang tiba di Aceh pada tahun 1566-1577M sebanyak 500 orang, termasuk para ahli senjata api, penembak, dan para teknisi. Dengan bantuan ini, Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1568 (Pusponegoro, 1984:54).

Kehadiran Kurtoglu Hizir Reis bersama armada dan tentaranya dengan sendirinya disambut dengan sukacita oleh umat Islam Aceh. Mereka disambut dengan upacara besar. Kurtoglu Hizir Reis kemudian diberi gelar sebagai gubernur (wali) Aceh (Ambary, et.al.:54), yang merupakan utusan resmi Khalifah yang ditempatkan di daerah Aceh.

5. Bendera Turki di Kapal Aceh

Hubungan Aceh dengan Turki Utsmani terus berlanjut, terutama untuk menjaga keamanan Aceh dari serangan Portugis. Menurut seorang penulis Aceh, pengganti al-Qahhar kedua, yakni Sultan Mansyur Syah (985H-98 / 1577M-88) memperbarui hubungan politik dan militer dengan Utsmani (Zainuddin, 1961:72-77). Hal ini dibenarkan oleh sumber-sumber historis Portugis. Uskup Jorge de Lemos, sekretaris Raja Muda Portugis di Goa, pada tahun 993H / 1585M melaporkan kepada Lisbon bahwa Aceh telah kembali berhubungan dengan Khilafah Utsmaniyah untuk mendapatkan bantuan militer guna melancarkan serangan baru terhadap Portugis. Penguasa Aceh berikutnya, Sultan Alauddin Riayat Syah (988-1013H / 1588-1604M) juga dilaporkan telah melanjutkan hubungan politik dengan Turki. Dikatakan, Khilafah Utsmaniyah bahkan telah mengirimkan sebuah bintang kehormatan kepada Sultan Aceh dan memberikan izin kepada kapal-kapal Aceh untuk mengibarkan bendera Turki (Azra, 2004: 44-45).

Kapal-kapal atau perahu yang dipakai Kesultanan Aceh dalam setiap peperangan terdiri dari kapal kecil yang gesit dan kapal-kapal besar. Kapal-kapal besar atau jung yang mengarungi lautan hingga Jeddah berasal dari Turki, India, dan Gujarat. Dua daerah terakhir ini merupakan bagian dari wilayah Kekhilafahan Turki Utsmani. Menurut Court, kapal-kapal ini cukup besar, berukuran 500 sampai 2000 ton (Pusponegoro, 1984:56). Kapal-kapal besar yang berasal dari Turki, yang dilengkapi meriam dan persenjataan lainnya dipergunakan Aceh untuk menyerang penjajah dari Eropa yang mengganggu wilayah-wilayah Muslim di Nusantara (Pusponegoro, 1984:96). Aceh benar-benar tampil sebagai kekuatan besar yang sangat ditakuti Portugis karena diperkuat oleh para ahli persenjataan dari Kekhilafahan Turki sebagai bantuan Khalifah terhadap Aceh (Pusponegoro, 1984:257)

Menurut sumber-sumber Aceh, Sultan Iskandar Muda (1016H-46/1607M-36) mengirimkan armada kecil yang terdiri dari tiga kapal, yang mencapai Istanbul setelah dua setengah tahun pelayaran melalui Tanjung Harapan. Ketika misi ini kembali ke Aceh, mereka diberi bantuan sejumlah senjata, 12 pakar militer, dan sepucuk surat yang merupakan keputusan Khilafah Utsmaniyah tentang persahabatan dan hubungan dengan Aceh. Keduabelas pakar militer tersebut disebut pahlawan di Aceh. Mereka dikatakan sangat ahli sehingga mampu membantu Sultan Iskandar Muda tidak hanya dalam membantu membangun benteng tangguh di Banda Aceh, tetapi juga istana kesultanan (Azra, 2004:45)

6. As-Singkeli dan *Qanun Syariah* di Aceh

Sebagai bagian Khilafah Islam, Aceh menerapkan syariat Islam sebagai patokan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Aceh banyak didatangi para ulama dari berbagai belahan Dunia Islam lainnya. Syarif Makkah mengirimkan ke Aceh utusannya, seorang ulama bernama Syaikh Abdullah Kan'an sebagai guru dan muballigh. Sekitar tahun 1582, datang dua orang ulama besar dari negeri Arab, yakni Syaikh Abdul Khair dan Syaikh Muhammad Yamani. Di samping itu, di Aceh sendiri lahir sejumlah ulama besar, seperti Syamsuddin as-Sumatrani dan Abdur Rauf as-Singkeli (Daly, 1982: 15-16)

Abdur Rauf Singkel mendapat tawaran dari Sultan Aceh, Safiyatuddin Shah untuk menduduki jabatan kadi / hakim (*qâdhi*) dengan sebutan Qadhi al-Malik al-Adil yang sudah lowong beberapa lama karena Nuruddin ar-Raniri kembali ke Ranir (Gujarat). Setelah melakukan berbagai pertimbangan, Abdur Rauf menerima tawaran tersebut (Daly, 1982: 32). Karena itu, ia resmi menjadi kadi / hakim (*qâdhi*) dengan sebutan Qadhi al-Malik al-Adil. Selanjutnya, sebagai seorang kadi / hakim, Abdur Rauf diminta Sultan untuk menulis sebuah kitab sebagai patokan (*qânûn*) penerapan syariat Islam (Daly, 1982: 36). Buku tersebut kemudian diberi judul *Mir'ah al-Thullâb*.

Menurut Abdur Rauf, naskah *Mir'ah ath-Thullâb* mengacu pada kitab *Fath al-Wahhâb* karya Abi Yahya Zakariyya al-Ansari (825-925 H).

Sumber lain yang digunakan untuk menulis buku ini ialah: *Fath-al-Jawwâd*, *Tuhfah al-Muhtâj*, *Nihâyah al-Muhtâj*, *Tafsîr al-Baydawi*, *al-Irsyâd*, dan *Sharh Shahîh Muslim* (Daly, 1982: 38)

Mir'ah ath-Thullâb mengandung semua hukum fikih Imam asy-Syafi'i, kecuali masalah ibadah. Peunoh Daly dalam disertasinya hanya menguraikan sebagian kandungan *Mir'ah ath-Thullâb*, terdiri dari: Hukum Nikah, Talak, Rujuk, Hadlanah (Penyusuan), dan Nafkah. Namun, terlepas dari itu, Aceh sebagai bagian dari Khilafah Islam memiliki *qânûn* (undang-undang) penerapan syariat Islam yang ditulis oleh Abdur Rauf as-Singkeli.

Banyak bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang dekat antara Aceh dan Khilafah Turki Utsmani. Aceh seakan-akan dianggap sebagai bagian dari wilayah Turki Utsmani. Persoalan yang menimpa umat Islam di Aceh seakan-akan dianggap sebagai persoalan umat Islam secara keseluruhan. Turki Utsmani melindungi wilayah Aceh serta membantu Aceh melakukan *futûhât* dan dakwah.

Namun demikian, perlu penelitian lebih lanjut: apakah Aceh benar-benar menjadi bagian dari Kekhilafahan Turki Utsmani ataukah merupakan negeri sendiri yang mendapat perlindungan Khilafah akibat solidaritas dan persaudaraan Islam? Yang jelas, peran Khilafah Islam di wilayah Nusantara bukan suatu hal yang asing. Perlindungan Khalifah pernah dirasakan oleh umat Islam di Nusantara

c. Pengiriman Utusan Ke Luar Negeri

Perjanjian Hudaibiyah merupakan manuver politik Rasulullah Saw. yang amat gemilang. Melalui perjanjian tersebut, beliau berhasil memasung kekuatan kafir Quraisy Makkah sehingga ancaman dari arah selatan (yaitu kota Makkah dan sekitarnya) bisa dieliminasi. Dengan demikian, Rasulullah Saw. dapat memusatkan perhatiannya untuk menghadapi kekuatan di daerah utara Madinah al-Munawwarah (yaitu Yahudi yang terkonsentrasi di kawasan Khaibar).

Ekspedisi militer Khaibar yang digelar oleh Rasulullah Saw.—tidak lama setelah Perjanjian Hudaibiyah—juga berhasil mengusir kekuatan Yahudi. Kekuatan Yahudi pun tercerai-berai semakin menjauhi kawasan Daulah Islamiyah; mereka tidak lagi berani melakukan provokasi, karena praktis kekuatan mereka sudah tidak ada lagi, baik secara militer maupun politis. Yahudi sudah tidak ada lagi wujudnya di kawasan Hijaz dan Nejd.

Semua ini menggambarkan bahwa di kawasan Jazirah Arab saat itu tidak ada lagi ada hambatan ataupun tantangan yang berarti dari kekuatan-kekuatan kufur maupun musyrik. Institusi musyrik dan kufur semakin sirna kekuatannya.

Setelah seluruh kawasan Jazirah Arab berhasil disatukan dalam naungan Daulah Islamiyah, Rasulullah Saw. mulai memusatkan perhatiannya keluar kawasan Jazirah. Sebagai sebuah negara yang memiliki *mabda'* (ideologi), yaitu Islam, beliau sangat memahami *fikrah* (ide utama) yang terdapat dalam risalah Islam, yaitu menyebarluaskan dakwah Islam (*nasyr al-*

mabda' atau *nasyr afkâr al-Islâm*). Fikrah ini dijabarkan melalui metode (*tharîqah*), yang dijalankan oleh Negara (Daulah Islamiyah). *Tharîqah* (metode) tersebut adalah dakwah dan jihad fiisabilillah. Tanpa adanya dakwah dan jihad fiisabilillah, tidak mungkin risalah (Islam) ini bisa disebarluaskan ke seluruh pelosok dunia. Hal itu harus dilakukan oleh institusi yang memiliki kemampuan, bukan saja secara politis tetapi juga militer. Sebab, yang dihadapinya adalah ideologi lain yang juga diusung oleh negara yang memiliki kemampuan melakukan manuver politis dan militer dalam skala internasional.

Sebuah negara tidak mungkin menjadi kekuatan adidaya yang mendunia kecuali mempunyai strategi politik luar negeri yang jelas dan *fixed* (baku). Sebuah negara tidak mungkin memiliki strategi politik luar negeri yang jelas dan baku, kecuali memiliki sebuah ideologi (*mabda'*). Ideologi itulah yang mengarahkan dan menuntun strategi politik luar negerinya dalam menghadapi berbagai negara dan kekuatan yang ada di dunia.

Karena itu, Rasulullah Saw. mulai melakukan langkah (tahap) pertama untuk *go internasional*, yaitu mengirimkan beberapa utusan kepada para raja dan pemimpin yang ada di kawasan Timur Tengah, termasuk kepada dua negara besar saat itu; Romawi dan Persia.

Para utusan itu membawa hanya dua pesan, yaitu:

1. Menyampaikan dan mengajak para raja dan pemimpin itu untuk mengimani *mabda'* (ideologi) Islam.

2. Memperkuat Daulah Islamiyah dengan bergabung dalam kekuatannya, dalam rangka menegakkan dan menerapkan *mabda'* (ideologi) Islam atas seluruh umat manusia di dunia.

Itulah yang menjadi ciri yang senantiasa ada di dalam surat-surat Nabi Saw. kepada para raja dan pemimpin yang ada. Beliau mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi kepada Kaisar (Heraclius) di Romawi; Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi kepada Kisra penguasa Persia; Amru bin Umayyah adh-Dhamiri kepada Najasy penguasa Habsyah; Hathib bin Abi Baltha'ah kepada Muqauqis penguasa Iskandariyah (Mesir); Amru bin 'Ash as-Sahmi kepada Jaifar dan Iyad yang keduanya adalah anak dari Julanda al-Azadiyin penguasa Oman; Salith bin Amru kepada Tsumamah bin Utsal dan Haudah bin Ali yang keduanya dari Kabilah Hanifah penguasa Yamamah; 'Ala bin Hadhrami kepada Mundzir bin Sawa al-Abdi penguasa Bahrain; dan Syuja' bin Wahab al-Azadi kepada Harits bin Syamir al-Ghassani penguasa di perbatasan Syam.

Reaksi para raja dan penguasa yang ada saat itu sangat beragam. Ada yang menerima seruan Rasulullah Saw. seraya memeluk Islam dan bergabung dengan Daulah Islamiyah. Ada yang menolak secara halus dan berbasa-basi diplomatis seraya mengirimkan hadiah kepada Rasulullah Saw. Ada juga yang merobek-robek surat Rasulullah Saw. dan memaklumkan perang terhadap Daulah Islamiyah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa langkah yang ditempuh Rasulullah Saw. dengan mengirimkan berbagai utusan ke berbagai raja dan penguasa di sekitar kekuasaan Daulah Islamiyah menjadi poin penting untuk

penyebarluasan *mabda'* (ideologi) Islam ke luar Jazirah Arab. Hal ini juga menandai poin baru dalam penyampaian dakwah kaum Muslim ke luar negeri dan berinteraksi dengan negara-negara lain. Rasulullah Saw. telah membuka pintu gerbang memasuki percaturan politik internasional, yang tidak pernah dikenal dalam sejarah bangsa Arab pada masa-masa sebelumnya.

Tahap tersebut telah dijalankan oleh Rasulullah Saw. Bahkan beliau telah mempersiapkan tahap berikutnya jika penyampaian dakwahnya kepada para raja itu menjumpai hambatan fisik, yaitu jihad fiisabilillah. Beliau melakukan persiapan untuk memberangkatkan ekspedisi militer (yang dipimpin Usamah bin Zaid) ke perbatasan Syam. Para khalifah pengganti beliau berhasil melanjutkan tahap berikutnya. Pada akhirnya, melalui dakwah dan jihad fiisabilillah ini seluruh kekuatan yang ada—termasuk Persia dan Romawi—berhasil dikalahkan dan tunduk pada Daulah Islamiyah.

Dengan demikian, misi *mabda'* (ideologi) Islam, yaitu penyebarluasan Islam, sampainya Islam kepada seluruh umat manusia, atau dirasakannya penerapan sistem Islam oleh umat manusia berhasil diraih.

Lalu kapankah kita, wahai kaum Muslim, memiliki lagi kekuatan yang dahulu pernah menggentarkan dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang zalim? Bukankah sudah saatnya bagi kita mewujudkan kembali Daulah Islamiyah agar bisa menyampaikan petunjuk (*al-hidâyah*) dan kebenaran (*al-haq*) kepada seluruh umat manusia; sekaligus melenyapkan kebatilan dan kekufuran?

B. KHILAFAH MENJADI IDE KEMBALI

a. Perjuangan Menegakkan Syari'at Islam Di Indonesia

Bagai sumber mata air yang tak pernah habis, perjuangan menegakkan syariat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terus mengalir; memberikan kekuatan dalam bentuk gerak dan pemikiran yang senantiasa digelorakan. Pasang-surut memang terjadi, tetapi semangat perjuangannya tak pernah padam. Ia terus menyala dalam setiap dada putra-putri kaum Muslim yang terbakar oleh panasnya ideologi Islam ini. Mereka tak kenal lelah, tak pernah takut, bahkan rela menjadi martir dalam perjuangan mulia ini.

Ide negara Islam sebagai wadah penegakkan dan penerapan syariat Islam bahkan sudah ada di Indonesia sejak terbentuknya Kesultanan Aceh sekitar tahun 1042. Hal ini tentu amat wajar mengingat perjuangan kesultanan-kesultanan Nusantara hingga perjuangan kemerdekaan RI dimotori oleh para pejuang Muslim. Itu sebabnya, jika sekarang gairah perjuangan itu tetap menyala, seharusnya tidak disikapi dengan kecurigaan. Selain bukan hal baru, perjuangan penegakkan dan penerapan syariat Islam sebagai ideologi negara ini tidaklah 'aneh'.

Perjalanan sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang sudah sangat lama itu menjadi benih berkembangnya gagasan Negara Islam, terutama pasca keruntuhan Daulah Khilafah Islamiyah di Turki Utsmani pada 3 Maret 1924. Melalui sejarah pula, kita bisa mengetahui bahwa secara real sistem pemerintahan Islam pun telah pernah eksis di Indonesia

yang dipelopori Kesultanan Samudera Pasai. Jadi, kecurigaan dan ketakutan sebagian kalangan terhadap penerapan Islam sebagai ideologi negara ini tidaklah beralasan; sangat tidak beralasan.

b. Tumbuh Subur pada Masa Penjajahan

Dr. H. Roeslan Abdulgani menuliskan (1980):

“Dengan segala macam “kekurangmurniannya” dan dengan segala komprominya dengan praktek kehidupan pra Islam, namun Islam berfungsi bagi orang-orang Indonesia sebagai pusat pemersatu daripada identitasnya, dan merupakan lambang bagi pemisahan dan tantangan terhadap para penjajah asing yang beragama Kristen. Sepanjang empat abad lamanya perlawanan terhadap penjajahan Belanda, apakah perlawanan itu dilakukan oleh kaum fanatisi agama, ataupun secara kurang begitu banyak tapi sangat besar dilakukan oleh golongan kaum bangsawan Indonesia di bawah bendera Bulan Bintang, namun hampir semua perlawanan itu terkait dengan agama Islam....”

Tulisan tersebut kian menunjukkan bahwa Islam bukanlah semata sebagai agama, tetapi sekaligus ideologi. Ketika Islam dipahami sebagai ideologi, maka “*hararah al-mabda*” (panasnya ideologi) itu akan menggerakkan turbin pemikiran dan mewujudkan dalam bentuk perjuangan untuk melawan kedzaliman.

Islam sebagai ideologi juga disadari oleh para orientalis Barat. Mereka sepakat, “*Islam is not merely a religion. It is also a way of life and a whole civilization*” (Islam bukan sebagai agama belaka, tetapi juga sebagai suatu gaya dan cara hidup serta suatu peradaban lengkap). Jangan heran jika Bung Karno pun pernah mengatakan, “*Islam is not only a religion of the mosque, but also of life and struggle!*” (Islam tidak hanya

agama untuk diamankan di masjid-masjid, tetapi juga untuk diamankan di bidang kehidupan dan di medan juang!) (Hasymy, 1984:111)

Dengan kenyataan seperti ini, tentu amat wajar jika pada masa penjajahan, perlawanan terhadap kaum imperialis dimotori oleh para pejuang Muslim. Mereka bergerak dan bahu-membahu membangun kekuatan untuk melepaskan belenggu yang dirantaikan oleh para penjajah. Penindasan Belanda atas Islam justru menjadikan Islam mampu meletakkan dasar-dasar identitas bangsa Indonesia. Singkatnya, Islam dijadikan sebagai lambang perlawanan terhadap imperialisme. Tidak hanya terbatas pada kalangan *grass root*, golongan bangsawan dan sultan pun menyatukan dirinya menunjang perjuangan Islam, berjuang di bawah lambang 'Bulan Sabit'. Dalam bahasa Dr. H. Roeslan Abdulgani, kaum Muslim pada masa penjajahan itu menganggap bahwa Islam sebagai *liberating force* (kekuatan pembebas).

Tekanan-tekanan yang begitu kuat dari penjajah membuat kaum santri berontak. Dalam kondisi seperti ini, menurut Suryanegara (1985:240), fungsi pesantren pun berubah. Lembaga pendidikan ini kemudian berubah menjadi *a centre of anti-Dutch sentiment* (pusat pembangkit anti-Belanda). Jadi, sangat wajar jika sejarah kemudian mencatat beberapa aksi pemberontakan kaum santri (*Santri Insurrection*) seperti di Cirebon (1802-1806), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1838), dan Perang Aceh (1873-1908). Bahkan Anthony Reid (1969) menyatakan bahwa di Aceh ini Belanda

jatuh-bangun melawan santri-santri Aceh. Para ulama tidak pernah absen melancarkan gerilya hingga tahun 1942. Belanda pun kewalahan.

c. Membangkitkan Gerakan Bersama

Perjuangan ulama-ulama di beberapa daerah dalam melawan Belanda berangsur-angsur diganti dengan gerakan secara bersama-sama. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini memerlukan kebersamaan dan pusat komando. Perjuangan yang dilakukan akhirnya tidak sebatas perlawanan senjata, tetapi lebih mulai meluas ke berbagai bidang. Ada ulama yang kemudian memilih untuk mendidik masyarakat supaya motivasinya bangkit kembali di bidang ekonomi perdagangan. Berdirilah SDI (Sarekat Dagang Islam) pada 16 Oktober 1905 yang dimotori H. Samanhudi. Setahun kemudian, SDI diubahnya menjadi Sarekat Islam (1906). Berdirinya SI ini merupakan alternatif karena saat itu Belanda melarang pembentukan dan berdirinya orpol (organisasi politik).

SI juga tidak bisa dipisahkan dari tokoh kharismatik, brilian, dan juga berasal dari kaum ningrat, yakni HOS Tjokroaminoto. Di tangan beliaulah SI sedemikian berkembang dan berani mengibarkan bendera Islam, bahkan berpolitik. Itu sebabnya, P.H. Fromberg mencatat informasi Haji Oemar Said Tjokroaminoto tentang alasan agama dijadikan landasan ideologinya, “Sarekat Islam menggunakan agama Islam sebagai tali pengikat, dan apa yang dicitakannya adalah kemajuan bangsa Indonesia, dan Islam tidaklah menjadi penghambat karenanya.” (Suryanegara, 1984:193).

Melengkapi perjuangan SI, KH Ahmad Dahlan, pada 18 November 1912, mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Upaya ini merupakan terobosan untuk membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia dari kebodohnya, melalui lembaga sosial dan pendidikan. Catatan sejarah dari A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, menjelaskan tentang sikap Muhammadiyah yang membuka diri untuk rakyat, berakibat Budi Utomo sebagai gerakan bangsawan menjadi tertinggal. Hal ini disebabkan, menurut analisis Ki Hajar Dewantoro (Suwardi Surjaningrat), "*Het Javaansche nationalisme in de Indische Beweging*" (Bagi rakyat, arti Islam identik dengan tanah air, bangsa pribumi, dan gerakan antipenjajah) (Suryanegara, 1984: 221)

Gerakan bersama yang dipelopori intelektual Islam terus berkembang, bahkan kemudian mengisi lembaran sejarah perjuangan Islam di Tanah Air ini yang layak ditulis dengan tinta emas. Didahului oleh berdirinya organisasi Muhammadiyah tahun 1912 yang dimotori oleh K.H. Akhmad Dahlan. Kemudian tanggal 31 Januari 1926, gerakan NU (Nahdhatul Ulama) lahir. Sejatinya, 'embrio' NU ini adalah gerakan *Taswirul Afkar*, yaitu sebuah gerakan diskusi yang dibangun oleh Wahab Hasbullah (1914), lalu berganti nama menjadi *Nahdhatul Wathon* pada 1916. Pada awalnya, NU justru lahir sebagai organisasi politik pada zamannya.

NU dengan *Statuten* (Anggaran Dasar) 1926, dalam praktik perjuangannya menampilkan diri sebagai jam'iyah (organisasi) yang

sangat tanggap terhadap peristiwa politik nasional dan luar negeri. Pada saat pemerintah RI masih ragu-ragu menentukan sikapnya terhadap pendudukan kembali Sekutu dan Belanda, NU mengeluarkan *Resolusi Jihad* (22 Oktober 1945) di Surabaya. Resolusi Jihad ini mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan Mukhtamar Umat Islam di Yogyakarta pada 7 November 1945. Pengaruhnya secara fisik diperlihatkan dengan pembentukan sayap militer seperti Barisan Sabilillah, Hizbullah, dan Mujahiddin. Itu sebabnya, tidak begitu aneh jika Mukhtamar Umat Islam menyatakan kepada setiap penjajah, “60 Milyun Kaum Muslimin Indonesia Siap Berjihad FiiSabilillah. Perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan.” (Suryanegara, 1984:297)

Laskar Hizbullah ditugaskan untuk menjawab tantangan Sekutu yang mengadakan pendudukan di Surabaya, Semarang, Ambarawa, Bandung, dan daerah lainnya. Di Surabaya pertempuran meletus pada 10 November 1945. Perang Sabil di Ambarawa, yang dalam penulisan sejarah dikenal dengan *Palagan Ambarawa*, terjadi pada 10 Muharram 1365 H/14 Desember 1945M. Perang hebat di Ambarawa ini berakhir dengan kemenangan gemilang di pihak para ulama. Laskar Hizbullah dan rakyat dalam pertempuran ini dipimpin oleh Kiai Moechlis dari Cilacap.

Pada masa pergerakan nasional dan revolusi fisik ini, muncul juga gerakan penegakkan syariat Islam dengan cara mengangkat senjata. Setidaknya, ini dipelopori oleh DI/TII pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo. Pada 7 Agustus 1949, Kartosoewiryo resmi

memproklamasikan NII (Negara Islam Indonesia). Dalam konstitusinya, *Qanun Azasy* yang dirancang setahun sebelum proklamasi, disebutkan NII merupakan karunia Ilahi. Konstitusi NII juga menyatakan, Islam adalah landasan dan dasar hukum negara, dengan berpegang pada al-Quran dan hadis sebagai kekuasaan tertinggi. Pada bagian lain disebutkan, negara menjamin berlakunya syariat Islam dalam masyarakat Islam serta—ini perlu digarisbawahi—menjamin pemeluk agama lain untuk beribadah menurut upacaranya sendiri (Mimbar, 2000: 23)

Setelah NII dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah RI, karena dinilai sebagai “negara dalam negara,” maka TNI melakukan operasi penumpasan gerakan Islam ini. Sekarang, organisasi ini masih eksis meski sudah “membelah diri” menjadi beberapa bagian. Ada yang masih murni memperjuangkan syariat Islam, tetapi ada juga yang kemudian menyimpang dari pakem semula.

d. Perjuangan via Parlemen

Berkembangnya informasi dan pengetahuan di bidang politik ternyata berdampak pada berubahnya model perjuangan Islam. Partai-partai Islam lahir menjelang Pemilu pertama tahun 1955. Ini semakin menegaskan bahwa perjuangan penegakkan syariat Islam tak pernah berhenti; dicoba dengan berbagai cara, termasuk dengan jalan menguasai parlemen. Dukungan rakyat pun cukup signifikan. Itu tergambar pada hasil Pemilu 1955 yang memunculkan nama-nama partai Islam seperti Masyumi yang didukung 8 juta suara (20,9%) dan Nahdhatul Ulama dengan 7 juta

suara (18,4%) di posisi empat besar. Akan tetapi, mereka kalah bersaing dengan Partai Nasional Indonesia yang mengantongi 8,5 juta suara. Sementara itu, PKI tertinggal di urutan keempat dengan mengumpulkan suara 6,1 juta suara (Noer, 1987:6).

Perjuangan via parlemen juga dipilih oleh partai Islam moderen yang cukup besar seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera (dulu Partai Keadilan) yang berhasil masuk parlemen pada Pemilu 1999 dan 2004.

Meski langkah mereka yang menempuh jalur ini menuai 'kritik' dari beberapa kalangan, termasuk dari kalangan yang memilih jalur ekstraparlemen, itu setidaknya menunjukkan 'niat baik' dari partai-partai tersebut yang tetap menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan dan bertujuan menegakkan syariat Islam via parlemen. Semoga saja memang demikian, meski hasilnya belum terasa secara signifikan. Yang jelas niat baik saja tidak cukup.

Harus ada upaya yang berani dan terbuka untuk menyatakan sistem demokrasi adalah sistem kufur. Sekaligus menjelaskan satu-satunya sistem yang sah yang harus diperjuangkan umat adalah sistem Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Terlepas dari pro-kontra ini, rasa-rasanya perlu juga dipertimbangkan pernyataan Dr. Saiful Mujani yang menulis, “Keterbatasan demokrasi ini harus disadari oleh kelompok demokrat dan kelompok politik syari'ah yang memperjuangkan aspirasi politiknya di

jalur demokrasi. Demokrasi tidak akan mampu mewartakan kekuatan yang akan membunuh demokrasi itu sendiri.” (Islamlib, 2002:3)

e. Bersentuhan dengan Dunia Internasional

Besarnya perhatian umat Islam Indonesia ditujukan juga terhadap perjuangan umat Islam Turki yang mencoba menyelamatkan Khilafah Islamiyah di Turki dari gerakan sekularisme yang diusung Mustafa Kamal, walaupun kondisi dalam negeri menuntut umat Islam Indonesia untuk mematahkan pengaruh komunis (1920) yang berada dalam tubuh umat Islam. Kegandaan kepentingan dalam dan luar negeri ini mempengaruhi lahirnya keputusan Kongres Al-Islam di Cirebon (1922), di Garut (Mei 1924), dan Surabaya (Desember 1924) yang berisikan: menentang komunis, nonkoperasi terhadap Belanda, dan menentukan utusan ke Kongres Khilafah yang rencananya diadakan di Kairo (Suryanegara, 1984:227)

Tiga organisasi Islam yang berpartisipasi dalam Kongres Al-Islam tahun 1922 adalah Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Al-Isryad. Selain membahas penyatuan kalangan pembaru dan tradisional dalam beberapa masalah agama, Kongres Al-Islam pun kerap membicarakan masalah politik seperti masalah Khilafah (Noer, 1987:152).

Menurut Deliar Noer, Sarekat Islam juga berusaha untuk memonopoli persoalan Khilafah, khususnya dalam memosisikan diri sebagai satu-satunya wakil pihak Islam Indonesia dalam Kongres Khilafah di Makkah pada 1926. Namun, peranan partai ini dalam masalah Khilafah

habis begitu saja disebabkan berkurangnya perhatian negeri-negeri Islam lain tentang masalah ini (Noer, 1987:153)

Ide Khilafah ini juga yang kemudian gencar dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir. Karena pengaruh perkembangan politik dan juga hubungan dengan dunia luar, maka sebagian kaum Muslim di Indonesia pun mulai mengenal gerakan ini pada awal tahun 80-an dan mengambil bagian dalam perjuangan bersama partai politik Islam lintas negara ini.

Partai politik Islam yang didirikan di Yordania pada 1953 oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ini bertujuan melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Kelompok dakwah dan juga partai politik ini mendasarkan perjuangannya pada thariqah dakwah Rasulullah saw yang tidak pernah berkompromi dengan kekufuran yang ada.

Sebagai partai politik Islam lintas negara, Hizbut Tahir juga eksis di berbagai negara di kawasan Eropa, Afrika, Amerika, Asia, dan Australia. Di Indonesia, Hizbut Tahrir sudah berkiprah sejak awal tahun 1980-an. Ide Khilafah ini terus dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir agar kaum Muslim juga memahami pentingnya institusi Negara Islam dan wajib memperjuangkannya saat ini.

f. Upaya Depolitisasi Islam

Sejarah perjuangan penegakkan syariat Islam, termasuk di Indonesia yang sarat dengan pesan ideologi ini, harus terus dijaga dan wajib dikembangkan. Pembinaan terhadap kaum Muslim supaya melek

politik juga harus senantiasa digencarkan. Sebab, jika 'panasnya ideologi' sudah hilang dari diri umat (apalagi pejuangnya), maka alamat gerakan penegakkan Islam akan berakhir dengan segera.

Berkaca pada agenda politik Belanda dalam menjinakkan perlawanan para ulama dan santri pada masa lalu, kita perlu mewaspadai upaya depolitisasi ini. Saat menghadapi tekanan dari pribumi, pihak penjajah tentu saja tidak tinggal diam. Setelah mendapat masukan dari Prof. Dr. Snouck Hurgronje yang diangkat sebagai *Adviseur voor Inlandsche Zaken*, penjajah Belanda menerapkan *Dutch Islamic Policy*. Dari hasil riset Snouck, baik selama di Makkah maupun di Aceh, diakuinya bahwa ulama dan santri adalah kelompok kecil yang sangat mempengaruhi pandangan politik rakyat dan raja-raja atau sultan-sultan di Indonesia. Snouck melihat bahwa Islam sebagai agama dan Islam sebagai politik. Ulama dan santri itu sendiri tidak berbahaya. Itu sebabnya, Belanda kemudian mulai menyusun program untuk memisahkan ulama dari politik. Snouck juga menyarankan agar pemerintah Belanda menjalankan 'dwi kebijakan (*twin policies*)', yakni menganjurkan adanya toleransi agama, dan menindak dengan kekerasan terhadap ulama yang masih melancarkan kegiatan politik dan militer (Suryanegara, 1984:241).

Jika sekarang sekularisme terus menggerus kepribadian Islam kaum Muslim, bukan tidak mungkin upaya depolitisasi itu memang mendekati keberhasilan. Oleh karena itu, perjuangan penegakkan syariat

Islam saat ini harus lebih banyak menyedot perhatian dan lebih giat memeras keringat kita. Kita harus terus mengkampanyekan wajibnya Islam yang diterapkan sebagai ideologi negara.

C. Hubungan Negara dan Agama

Seluruh negara yang ada di muka bumi ini memisahkan hubungan negara dan agama. Hal ini dimulai sejak masa Renaissance dimana para cendekiawan dan negarawan menuntut agar gereja/agama tidak ikut campur dalam urusan negara. Paham inilah yang kemudian disebut dengan sekulerisme. Berdasarkan hal ini maka ada dikotomi antara agama dan negara.

a. Agama tidak menjadi ideologi Negara

Negara-negara sekarang pada umumnya menjadikan agama cukup sekedar untuk membimbing umat agar berbuat sesuai ajaran agamanya. Negara ini menganut paham sekulerisme dengan konsep negara nasionalis. Hal ini dapat ditemukan pada fakta lokalisasi pelacuran dengan menyebut 'pelacur' sebagai Pekerja Sek Komersial. Dengan adanya lokalisasi negara dapat mengontrol dan mengendalikan serta menjadi aset pendapatan daerah/negara. Demikian pula hal-hal lain yang notabene dilarang dalam agama. Meskipun disebutkan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler tetapi negara yang berbentuk kesatuan, tapi faktanya terjadi sekulerisme di tengah kehidupan masyarakat.

b. Agama menjadi ideologi Negara

Agama yang dimaksud disini adalah Islam yaitu menerapkan Syari'at Islam pada negara. Negara berbentuk Khilafah Islam yang memandang seluruh wilayah yang ada didunia ini adalah sama sehingga dapat bersatu di bawah naungan Negara Khilafah. Sehingga agama Islam menyatu dan melebur dalam sistem kenegaraan. Hukum-hukum yang diterapkan harus bersumber pada hukum-hukum Islam.

D. Proses Pengembalian Ide

Setelah membahas khilafah dan ide khilafah lebih jauh perlu diuraikan pokok-pokok metode mengembalikan sistem khilafah:

a. Tasqif (Pembinaan)

Tahapan ini merupakan tahapan pengkajian dan belajar untuk mendapatkan tsaqofah Islam.

1. **Tasqif Murokazzah** merupakan pembinaan individu-individu yang menyatakan kesediaannya untuk dibina secara intensif dalam format perhalaqohan. Pembinaan ini bermaksud untuk menjadikan kader-kader handal yang akan bergerak di tengah-tengah umat mengemban ideologi Islam untuk menerapkan syariat Islam.
2. **Tasqif Jama'ii** merupakan pembinaan yang dilakukan oleh hizb di tengah-tengah umat dalam rangka membangun kesadaran umat (wa'yul amm), melalui berbagai acara, seperti diskusi publik, seminar, lokakarya dan lain-lain.

b. **Tafa'ul Ma'al Ummah**

Tahapan ini merupakan tahapan berinteraksi dengan masyarakat. Tahapan ini dibagi menjadi tiga strategi:

1. **Ittisholaat** merupakan aktifitas kontak dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah pendakwah. Hal ini dilakukan agar terjadi regenerasi penerus perjuangan serta pendistribusian tugas-tugas dakwah sehingga beban dakwah akan semakin ringan.
2. **Talabun Nusrah** dimaksudkan untuk mencari dukungan dakwah serikat perlindungan apabila terjadi hal-hal yang membahayakan keberlangsungan aktivitas dakwah. Aktivitas ini pun akan berdampak baik terhadap keberlangsungan dakwah ketika tahapan terakhir, Istilamul Hukmi telah berhasil, sehingga dukungan dan perlindungan akan selalu diperoleh.
3. **Tabbanni masholihil umah** merupakan aktifitas yang dilakukan untuk merealisasikan pengaturan segala urusan umat dengan cara mengadopsi kemaslahatan-kemaslahatan umat. Misalnya, terjadi Tsunami di Aceh, maka didirikanlah posko bantuan baik materil maupun moril.

c. **Istilamul Hukmi**

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir metode mengembalikan sistem khilafah. Umat telah memahami akan kewajiban penerapan syari'at dalam kehidupan dan meminta pada pemimpinnya untuk menerapkannya. Dalam tahapan ini telah terjadi kesamaan dan kesadaran yang sama akan

pentingnya syari'ah dan khilafah di tengah-tengah umat. Sistem Khilafah diterapkan pada sebuah negara secara menyeluruh. Mengganti seluruh hukum yang bukan berasal dari Islam dan menggantikannya dengan hukum-hukum Islam. Negara dipimpin oleh seorang Khalifah dengan sistem sentralisasi dan administrasi dengan sistem desentralisasi.



BAB V

MAKNA LEKSIKAL

Kata *Khilafah* bermakna kepemimpinan umum bagi kaum Muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kata *Khilafah* dan *Imamah* memiliki makna yang sama. Kata *Khilafah* akan dibahas berdasarkan data yang terkumpul melalui makna leksikal yang mencakup:

A. Kesamaan Makna

Narasumber : Ulil Absar Abdala

Kategori : LSM – JIL (Jaringan Islam Liberal)

Dengan akal sehat yang biasa saja, sebetulnya dalil itu bisa dibaca dengan sederhana. Memang adanya "imam", penguasa, atau pemerintahan adalah syarat pokok bagi tertibnya suatu masyarakat. Dalil-dalil agama tentang wajibnya mengangkat imam hanya menegaskan saja hukum sosial yang sudah berlaku berabad-abad. Tidak ada yang istimewa dengan dalil-dalil itu. Agama datang untuk "men-taqrir" atau menetapkan adat dan hukum sosial yang baik. Salah satu adat sosial di mana-mana adalah bahwa setiap masyarakat selalu akan mengangkat seorang pemimpin yang mengatur dan menyelenggarakan kepentingan mereka. Pemimpin itu bisa kepala suku, lurah, camat, bupati, raja, sultan, khalifah, presiden, CEO, manager, dan lain-lainnya. Itulah "hukum besi sosial" yang berlaku di mana-mana. (ML.2.W.2. G.7-8. <http://purl.org/rss/1.0/modules/content//17/12/07>)

Narasumber : Syabab

Kategori : Masyarakat Umum

Pada tanggal 3 Maret 1924 diumumkan bahwa Majelis Nasional telah menyetujui penghapusan Khilafah dan pemisahan agama dari urusan negara. Pada malam harinya Mustafa Kemal memerintahkan gubernur Istanbul untuk mengusir Khalifah sebelum fajar, keluar Turki. (ML.3.W.2.G.7-8. <http://syabab1924.blogspot.com>. 23/12/07)

Narasumber : Mohammad Ihsan Abdul Djalil

Kategori : Masyarakat Umum

Tiadanya Khalifah yang menjadi pengayom dan pelindung, menjadikan kaum muslimin laksana makanan lezat yang disantap musuh-musuhnya. Satu per satu negeri Islam tunduk patuh dalam dominasi penjajahan kafir, wilayahnya diduduki, kekayaan alamnya dirampas, kehormatannya diinjak-injak, tanpa mampu memberikan perlawanan. (ML.4.W.2.G.7-8 <http://khalifahislam.multiply.com> 25/12/07)

Narasumber : *The Economist*

Kategori : Majalah Barat

Majalah *The Economist* edisi tahun 1996 meramalkan bahwa pada abad ke-21, akan ada dua kekuatan ekonomi raksasa yang muncul. Yang pertama adalah China dan yang satunya adalah Kekhilafahan. (ML.5.G.E.D.3 www.ummah.com. 27/12/07)

Narasumber : NIC/CIA

Kategori : Agen Intelijen Amerika

Sebuah laporan dari CIA memprediksi bahwa menjelang tahun 2020 sebuah “Kekhalifahan Baru” akan didirikan. Laporan setebal 123-halaman itu bertajuk “Pemetaan Masa Depan Global” dimaksudkan untuk mempersiapkan pemerintahan Bush untuk tantangan-tantangan masa depan, dan dipresentasikan kepada Presiden Amerika, para anggota Konggres, Kabinet dan para pejabat penting yang membuat keputusan. (ML.6.G.E.D.3 www.ummah.com, 27/12/07)

Narasumber : Muslimin

Kategori : Masyarakat Umum

Di India, Syaukat Ali dan saudaranya, Muhammad Ali, berusaha untuk mengisi kevakuman kepemimpinan muslimin yang disebut oleh pihak Barat sebagai, Gerakan mendirikan Khilafah kembali (*Khilafah Movement*).” (ML.1. W.2. G.7-8. <http://www.jamaahmuslimin.com>, 27/12/07)

Berdasarkan data di atas, frasa Kepemimpinan muslim memiliki kesamaan makna dengan kata Khilafah, Imamah, Kekhilafahan, kekhilafahan. Hal ini dapat kita urai dari kata dasar Kepemimpinan yaitu pimpin menjadi pimpinan kemudian menjadi pemimpin menjadi kepemimpinan. Sedangkan kata Kekhilafahan berasal dari khilafah yang maknanya berbeda dengan pimpin. Apalagi kata pimpinan jika dibandingkan dengan kata khilafahan berakhiran –an maka kata ini tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata Pemimpin apabila dibandingkan dengan Pekhilafah semakin tidak berterima dalam bahasa Indonesia. Yang menjadi masalah adalah ketika

kata *Kepemimpinan* Maka dapat disepadankan dengan *Kekhilafahan* atau *Kekhalifahan*. Perbedaan ini terjadi dari sumber bahasa yaitu bahasa Arab berkategori *masdar* dari *fi'il madhi khalafa* sehingga pembentukan katanya berbeda dengan kata *kepemimpinan*. Walaupun dalam aturan bahasa Indonesia hampir semua kata serapan dari bahasa Arab dianggap sebagai kata dasar dan dapat diturunkan dengan proses afiksasi, reduplikasi dan pemajemukan.

Sedangkan kata *khilaf* yang juga berasal dari bahasa Arab, berarti *keliru* atau *salah*. Biasanya kata *khilaf* ini berkaitan dengan perbuatan seseorang. Berdasarkan maknanya kata *khilaf* tidak berkaitan dengan kata *khilafah* maupun *khalifah*. Dua kata ini berbeda, kata *khilafah* huruf *lam* panjang, sedangkan *Khilaf* merupakan *ism* atau kata benda dari *khilafun* dengan huruf *lam* pendek yang berarti 'lupa', misalnya pada kalimat *ana khilaf* berarti 'saya lupa', dengan demikian kata *khilaf* bukan termasuk dalam pembahasan kata *khilafah* karena terdapat perbedaan baik secara semantik maupun morfologinya.

Kata *Kepemimpinan*, *Kekhilafahan*, *Kekhalifahan* dan *Keimamahan*, dapat saling bersinonim. Kata *Pemimpin* bisa bersinonim dengan kata *Kepala*, kata *Pemimpin* bisa bersinonim dengan *Khalifah*; juga kata *Pemimpin* bisa bersinonim dengan *Imam*. Namun ternyata kata *Kepala* tidak bersinonim dengan kata *Khalifah* maupun *Imam*. Hal ini menunjukkan ada unsur semantik (komponen makna) yang bisa mensinonimkan kata *Pemimpin* dengan kata *Kepala*, *Khalifah* dan *Imam*; tetapi tidak ada unsur semantik yang bisa

mensinonimkan kata *Kepala* dengan kata *Khalifah*, dan kata *Imam*. Misalnya pada contoh berikut ini:

Pemimpin
Kepala*
Khalifah*
Imam

gerakan itu sedang melakukan audisi di depan anggota dewan.

Pemimpin
Kepala*
Khalifah*
Imam

Sholat sedang berceramah di depan jama'ahnya.

Pemimpin
Kepala
Khalifah*
Imam*

Negara Islam mencanangkan pendidikan gratis.

Pemimpin*
Kepala
Khalifah*
Imam*

Sekolah datang lebih awal .

B. Kebalikan Makna

Narasumber : Tony Blair

Kategori : Perdana Menteri Inggris

Dia menyatakan:”Apa yang sedang kita lawan adalah ideology setan...Mereka menuntut penghancuran Israel; penarikan mundur semua orang Barat dari Negara-negara Islam, dengan mengabaikan kemauan rakyat dan pemerintahnya; pendirian Negara-negara semacam Taliban dan hukum Syari’ah di dunia Arab dan berujung yang sama pada kekhalifahan untuk semua Negara-negara Muslim. (ML.7.G.E.D.3 www.ummah.com. 27/12/07)

Narasumber : Farid Wazdi

Kategori : Tokoh Ormas

Isu Khilafah pun dikaitkan dengan terrorisme, sebagaimana yang terungkap dalam pidato Bush Kamis (6/10/2005) di depan undangan *National Endowment of Democracy* dan di hadapan *The Ronald Reagan Presidential Library* dalam kesempatan lain. Untuk pertamakalinya, Bush menyebutkan tujuan dari ideologi Islam ini, yakni mendirikan pemerintahan Islam dunia yang disebut oleh Bush dengan istilah ‘Imperium Islam’ dari Spanyol sampai Indonesia, yang akan menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan menggantikan Pemerintahan Moderat di negeri-negeri Islam. (ML.8.W.2.G.3-4. <http://farid1924.wordpress.com>. 24/12/07)

Kata atau frasa *Ideologi Setan, Penghancuran Israel, Negara-negara Islam, Taliban, Hukum Syari’ah, Kekhalifahan, negara-negara Muslim, Terrorisme, ideologi Islam, Pemerintahan Islam Dunia, Imperium*

Islam, Pemerintahan Moderat, yang berantonim dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

No	KEBALIKAN MAKNA	
	(+)	(-)
01	Kekhalifahan	Imperium Islam
02	Ideologi Islam	Ideologi Setan
03	Pemerintahan Islam Dunia	Pemerintahan Moderat
04	Negara-negara Muslim	Terrorisme
05	Negara-negara Islam	Taliban
06	Hukum Syari'ah	Penghancuran Israel

Berdasarkan data di atas, *ideologi Islam* dikategorikan sebagai makna positif (+) atau disejajarkan dengan kata *baik* sedangkan kata *ideologi setan* (-) disejajarkan dengan kata *buruk*. Kata *Ideologi Islam* yang berantonim dengan *Ideologi setan* tidak bisa dikatakan *Sangat ideologi Islam* atau *Sangat ideologi Setan* sedangkan kata yang berantonim *baik* dan *buruk* dapat dikatakan *sangat baik* dan *sangat buruk*. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat tipe-tipe keantoniman di dalam bahasa Indonesia.

Demikian pula kata *Kekhalifahan* yang berantonim dengan *Imperium Islam*. Kata *Imperium* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:349) termasuk nomina yang berarti, *kerajaan, kekaisaran*. Hal ini bertolak belakang dengan fakta dan definisi *Khilafah*, maka dapat disebutkan bahwa dua kata ini berantonim. Seperti juga pada kata *Air* dan *Api* yang dapat disebutkan dengan

Air Terpanas dan *Api Terpanas*. Namun, kata *Kekhilafahan* dan *Imperium Islam* tidak dapat dikatakan *Kekhilafahan Terpanas* atau *Imperium Terpanas*.

Data Kebalikan Makna yang diurutkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa dua kata tersebut saling berantonim. Namun demikian dalam teks pada data di atas sering kali dituturkan sebagai dua hal yang bersinonim. *Ideologi Islam* dengan *Ideologi Setan* dianggap oleh penutur sebagai dua hal yang bersinonim padahal kata *Islam* dan *Setan* jelas dua hal yang memiliki makna kebalikan baik secara bahasa maupun secara istilah. Berarti penutur memiliki maksud tertentu dibalik tuturan tersebut. Hal ini akan diungkap pada BAB berikutnya.

C. Ketercakupan Makna

Narasumber : Tony Blair

Kategori : Perdana Menteri Inggris

Dia menyatakan "Apa yang sedang kita lawan adalah ideology setan. Mereka menuntut penghancuran Israel; penarikan mundur semua orang Barat dari Negara-negara Islam, dengan mengabaikan kemauan rakyat dan pemerintahnya; pendirian Negara-negara semacam Taliban dan hukum Syariah di dunia Arab dan berujung yang sama pada kekhalifahan untuk semua Negara-negara Muslim. (ML.9.G.E.D.3 www.ummah.com. 27/12/07)

Narasumber : Farid Wazdi

Kategori : Tokoh Ormas

Isu Khilafah pun dikaitkan dengan terrorisme, sebagaimana yang terungkap dalam pidato Bush, Kamis (6/10/2005) di depan undangan *National Endowment of Democracy* dan di hadapan *The Ronald Reagan Presidential Library* dalam kesempatan lain. Untuk pertamakalinya, Bush menyebutkan tujuan dari ideologi Islam ini, yakni mendirikan pemerintahan Islam dunia yang disebut oleh Bush dengan istilah 'Imperium Islam' dari Spanyol sampai Indonesia, yang akan menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan menggantikan Pemerintahan Moderat di negeri-negeri Islam. (ML.10.W.2.G.3-4. <http://farid1924.wordpress.com>. 24/12/07)

Kata atau frasa yang terdapat pada data di atas juga memiliki ketercakupan makna seperti dalam tabel berikut ini:

No	KETERCAKUPAN MAKNA	
	KEHIPERNIMAN	KEHIPONIMAN
01	KHILAFAH	TERRORISME
02	Pemerintahan Islam Dunia	Ideologi Setan
03	Negara-negara Muslim	Penghancuran Israel
04	Hukum Syari'ah	Pemerintahan Moderat
05	Ideologi Islam	Imperium Islam

Ketercakupan makna atau kehiperniman dari kata *Khilafah* mencakup makna kata, *Pemerintahan Islam Dunia*, *Negara-negara Muslim*, dan *Hukum Syari'ah*. Sedangkan ketercakupan makna atau kehiponiman dari kata

Terrorisme tercakup dalam makna kata *Ideologi Setan, Penghancuran Israel, Pemerintahan Moderat, dan Imperium Islam.*

Kemudian ada lagi fakta adanya kata yang bukan maknanya mencakup sejumlah makna kata lain, melainkan mencakup sejumlah kata yang merupakan bagian (komponen) dari kata tersebut. Misalnya, kata *Khilafah* mencakup di dalamnya kata *Khalifah, hukum syari'ah, dan Ideologi Islam,* dan lain-lain. Di sini kata *Khilafah* dan bagian-bagiannya tidak sama dengan kasus *Terorisme, dengan penghancuran Israel.* Jika kata *penghancuran Israel* merupakan ketercakupannya makna dengan kata *Terorisme,* mengapa kata *penghancuran Irak, Penghancuran Afganistan,* dst tidak dianggap sebagai perbuatan *terorisme?* Hal ini akan diulas lebih mendalam konsep makna dalam budaya pada BAB VI.

D. Keberlainan Makna

Narasumber : Admin

Kategori : Masyarakat Umum

Saya berpendapat bahwa konsep khalifah mengharuskan secara pasti tiadanya pihak yang digantikan, baik tiadanya itu secara total atau hanya sebagian, baik tiadanya itu karena kematian, perpindahan, dicopot, mengundurkan diri, atau karena sebab lain yang membuat pihak yang digantikan tidak dapat melanjutkan aktivitasnya. Misalnya Anda berkata: "Abu Bakar merupakan khalifah Rasulullah shalallahu wa'alaihi wa sallam" yakni setelah Rasul meninggal. Atau Anda berkata: "Rasulullah menjadikan Ali sebagai khalifah di Madinah," yaitu ketika Nabi shalallahu wa'alaihi wa

sallam pergi dari Madinah untuk melakukan salah satu perang. Bila konsep ini telah jelas dan melahirkan kepuasan, maka orang yang merasa puas tadi akan menemukan kekeliruan pendapat orang yang mengatakan bahwa Adam dijadikan Allah sebagai khalifah-Nya di bumi. (ML.11.G.E.D.3 www.ummah.com. 27/12/07)

Narasumber : Fauzi

Kategori : Masyarakat Umum

Tepat sekali, apa yang dinyatakan oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II kurang – lebih 17 tahun setelah beliau tdk menjabat sbg khalifah. Maka, untuk mengambil Palestina, kaum Zionis itu menyusun rencana untuk menghancurkan Khilafah, dan setelah itu semuanya bisa dengan mudah mereka dapatkan, tanpa imbalan apapun. Itulah nasib Palestina, setelah Khilafah yang menaunginya tidak ada lagi. (ML.11.G.E.D.3 <http://fauzime.multiply.com> 27/12/07)

Dari data keberlainan makna antara dua butir leksikal, yaitu ada kata-kata yang bentuknya sama, tetapi maknanya sangat berlainan. Misalnya kata *Pacar* dalam kalimat, “*Pulang dari Mekah biasanya jama’ah haji membawa Pacar*”. Bermakna ‘*inai, pemerah kuku*’ Sedangkan dalam kalimat “*Si Joni mengajak Pacarnya ke Bioskop*”, bermakna ‘*kekasih*’ . Hal ini sebenarnya juga dapat dijumpai pada kata ‘*Khilafah*’ dalam kalimat “*Bila konsep ini telah jelas dan melahirkan kepuasan, maka orang yang merasa puas tadi akan menemukan kekeliruan pendapat orang yang mengatakan bahwa Adam dijadikan Allah sebagai khalifah-Nya di bumi.*” memiliki makna pemimpin di

muka bumi dalam arti luas. Maksudnya adalah setiap orang itu adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Dia dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hal ini dapat dijumpai dalam hadits Rasul dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Sementara dalam kalimat, "*Tepat sekali, apa yang dinyatakan oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II kurang – lebih 17 tahun setelah beliau tdk menjabat sbg khalifah.*". Kata "*Khalifah*" memiliki makna '*Kepala Negara Islam*' berbeda dengan makna kata '*Khalifah*' yang disebutkan pada kalimat diatas. Adanya fakta-fakta seperti itu dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana terjadinya bentuk-bentuk kata yang sama padahal maknanya tidak sama. Hal ini dapat menjadikan terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap suatu fakta. Sehingga lebih jauh lagi akan terjadi pertentangan makna pada satu entitas yang sama. Kata *Khilafah*, misalnya, perjuangan menegakkan kembali sistem ini sudah lebih dari 84 tahun dan belum berhasil juga. Hal ini bisa jadi karena terdapat perbedaan makna.

Perbedaan makna *Khilafah*, sejatinya merupakan hal yang alamiah karena sumber-sumber nash baik yang *qothi* maupun yang *dzoni* pun menyebabkan timbul berbagai penafsiran yang berbeda apabila masyarakat memaknai kata *Khilafah* tidak merujuk kepada Al-Qur'an, Hadits-hadits Mutawatir, Ijma' Sahabat yang kredibel dan Qiyas yang bersumberkan dari ketiga hukum tersebut, maka akan terjadi perbedaan makna diantara masyarakat. Atas dasar survey Syari'ah oleh SEM Institute ini, peneliti dapat

mencocokkan dengan data yang dianalisis secara antropologis. Seperti pada tabel hasil survey SEM institue di bawah ini, yang akan dijadikan sebagai validasi data.

E. Komparasi Data

Hasil analisis data diatas ditemukan bahwa terjadi pergeseran makna khilafah tentang kesamaan, yang belum tentu sama, kebalikan makna, yang maknanya disamakan oleh pihak kontra, ketercakupan makna dan keberlainan makna, sehingga persepsi tentang khilafah di masyarakat sangat beragam. Keberagaman ini perlu dikomparasi dari hasil survey oleh SEM institute yang mengajukan sebuah pertanyaan, "Apa yang dipahami masyarakat tentang 'Khilafah'?". Jawaban responden sangat beragam pula seperti pada tabel berikut ini:

PERSEPSI TENTANG KHILAFAH

No.	Kalimat	Makna Kalimat
1.	Negara Islam	Tetap
2.	Suksesi amanah Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi	Meluas
3.	Sebuah kekuasaan yang dipimpin seseorang untuk menerapkan aturan Islam di seluruh dunia	Tetap
4.	Kepemimpinan Islam yang mendunia yang tidak dibatasi oleh wilayah negara	Tetap
5.	Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam dan menerapkan aturan Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits	Tetap
6.	Kepemimpinan Islam lebih khusus golongan sunni	Menyempit
7.	Sistem negara yang menggunakan aturan-aturan Islam sebagai dasar pedoman negara	Tetap
8.	Sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan dalam sejarah Nabi Muhammad saw.	Menyempit
9.	Pemimpin Islam sedunia seperti Paulus/Paus	Menyempit
10.	Kepemimpinan yang dipilih oleh perwakilan rakyat yang kredibilitasnya dapat	Meluas

	dipertanggungjawabkan (bukan seperti sistem demokrasi rakyat)	
11.	Kepemimpinan Islam yang sekarang terlupakan oleh umat Islam sendiri terutama ustadz, elit politik	Meluas
12.	Adalah sebuah negara Islam yang di dalamnya diatur dengan hukum-hukum Allah dan hadits	Tetap
13.	Tatanan yang sesuai dengan zaman nabi, tapi hanya 30 tahun saja	Menyempit
14.	Sistem pemerintahan yang ada dalam Islam yang pernah diterapkan selama lebih dari 14 abad	tetap
15	Pernah mendengar tapi tidak jelas, mungkin kerajaan Islam	Menyempit
16.	Pemerintahan, ketatanegaraan mengatur konsep Islam dalam kehidupan sehari-hari	Tetap
17.	Khilafah adalah suatu sistem yang telah diberlakukan sejak Rasul, Khulafaurrasyidin dalam khilafah demokrasi dijunjung tinggi	Menyempit
18.	Sistem pemerintahan Islam yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah sebagaimana dicontohkan oleh Rasul	Tetap
19.	Pemimpin yang dipilih dari kalangan muslim sesuai dengan yang diterapkan sepeninggal Rasulullah	Meluas
20.	Adalah suatu bentuk syura di mana pemimpin tidak berkampanye untuk dipilih tapi diangkat sesuai dengan kapasitas dan kualitas pribadinya	Menyempit
21.	Khilafah adalah suatu sistem pemerintah negara yang berlandaskan syariah dan berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits	Tetap
22.	Terbentuknya suatu kepemimpinan yang berdasarkan kepada Al Qur'an dan Al Hadits yang pernah ditunjukkan oleh para nabi dan sahabat-sahabatnya	Meluas
23.	Kepemimpinan pada suatu negara yang hanya berhukum / berpegang kepada Al qur'an dan Sunnah	Tetap
24.	Sistem politik yang berlaku dalam sistem yang mengatur tata pemerintahan	Meluas
25.	Khilafah perbedaan pendapat / jalan (khilafiyah) tapi Islam menganjurkan rahmat fastabiqulkhoirot	Menyempit

26.	Khilafah adalah terbentuk dari imamah yang terbentuk setelah jamaatul muslimin	Menyempit
-----	--	-----------

SEM Institute menyimpulkan hasil surveynya tentang Khilafah yaitu:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat (Umat Islam) terhadap konsep Khilafah adalah sebesar 77%
2. Terkait pemahaman terhadap Khilafah, sebagian umat Islam sudah memahami definisi dan konsep Khilafah dengan baik, meskipun demikian masih banyak umat Islam yang belum memahami konsep Khilafah.
3. Dari sisi tingkat penerimaan, 86% umat Islam setuju dengan konsep Khilafah dan 70% umat yakin bahwa Khilafah mampu menyatukan umat Islam sedunia dan bisa menjadi kekuatan untuk menghancurkan kedzaliman

Dari hasil survey pada tabel diatas ditemukan 11 responden (42,3%) menjawab dengan makna tetap, 9 responden (34,6%) menjawab dengan makna menyempit dan 6 responden (23,1%) menjawab dengan makna meluas. Secara semantik, masyarakat Indonesia kurang dari 50% memaknai khilafah dengan benar selebihnya tidak sesuai lagi dengan makna sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan kesimpulan dari SEM Institute memiliki nilai yang berbeda, artinya memang pihak pro maupun kontra dapat dikatakan berimbang atau dapat dikatakan bahwa pihak minoritas menguasai opini publik.

BAB VI

IDEOLOGI BAHASA PADA IDE KHILAFAH

Ideologi bahasa pada ide Khilafah dapat direkonstruksi melalui leksikon-leksikonnya. Sistem Khilafah merupakan sistem yang khas sehingga tidak dapat disejajarkan dengan sistem lain. Sistem ini seperti sebuah jembatan layang yang kokoh dengan tali-temalnya, sedangkan sistem lain seperti sebuah jembatan yang rapuh. Dari hasil rekonstruksi Khilafah diperoleh leksikon-leksikon seperti pada tabel di bawah ini:

No.	Rekonstruksi Leksikon	Makna
01	Khilafah	Sistem pemerintahan Islam
02	Ideologi Negara	Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas
03	Pemimpin Negara	Khalifah/Imamah
04	Dasar Negara	Agama Islam/Syari'at Islam/Hukum Islam
05	Wilayah Negara	Lintas negara/bangsa/transnasional
06	Pemilu Pemimpin Negara	Ba'iat seluruh rakyatnya baik langsung maupun tidak langsung atau melalui wakil-wakilnya yang duduk di Ahlul Halli wal Aqdi atau semacam majelis perwakilan rakyat.
07	Majelis Ummat	Ahlul hali wal Aqdi
08	Militer dan Kepolisian	Dairah Amri dan Syurthah
09	Partai Politik	Hizb
10	Masyarakat	Muslim dan non-Muslim(Ahlul Dzimmi)

Hasil rekontruksi leksikon-leksikon Khilafah dijadikan pijakan untuk menganalisa data yang dapat membuktikan bahwa terdapat ideologi bahasa pada ide Khilafah. Untuk membahas ideologi bahasa pada ide khilafah dapat diambil dari salah satu Tabel yang ada pada BAB V yaitu:

No	KEBALIKAN MAKNA	
	(+)	(-)
01	Kekhalifahan	Imperium Islam
02	Ideologi Islam	Ideologi Setan
03	Pemerintahan Islam Dunia	Pemerintahan Moderat
04	Negara-negara Muslim	Terrorisme
05	Negara-negara Islam	Taliban
06	Hukum Syari'ah	Penghancuran Israel

Dari tabel kebalikan makna diatas dapat dianalisa adanya ideologi bahasa pada ide khilafah sekaligus dikaitkan dengan budaya masyarakat Indonesia, yang diuraikan sbb:

A. Spiritualitas

IDEOLOGI BAHASA	MAKNA KHILAFAH	
	LEKSIKAL	GRAMATIKAL
Spiritualitas	Sistem pemerintahan Islam dengan Syari'at Islam	Penelitian ini tidak mengungkap makna Khilafah melalui makna gramatikal.

Kata *Khilafah* memiliki nilai spiritualitas karena bersumberkan pada *Ideologi Islam*, maka dalam sistem kenegaraan ini harus menerapkan *Hukum Syari'ah* terhadap seluruh *negara-negara Muslim* maupun non muslim yang sudah tunduk terhadap negara Islam karena *Khilafah* merupakan *pemerintahan Islam dunia*.

Nilai spiritualitas yang terdapat pada kata *Khilafah* akan juga dijumpai pada kebalikan maknanya, yaitu kata *Terorisme* yang memiliki nilai spiritualitas dari sumber *Ideologi Setan*. Sebuah ideologi yang akan selalu berseberangan dengan ideologi Islam. Sehingga sejatinya Islam tidak pernah mengajarkan *Terorisme* sebab sumber spiritualitasnya bertentangan.

Faktanya dalam budaya, yang tercermin pada budaya kekinian teropini bahwa Islam itu identik dengan *terorisme*. Seperti pemberitaan di media massa yang di-*blow-up* seolah-olah seluruh kerusuhan atau tindakan *terorisme* itu dilakukan oleh orang, 'berpeci, bersorban, berjubah' yang merupakan ikons dari orang Islam atau muslim.

Pencitraburukan terhadap Islam ini, secara psikologis menekan jiwa umat Islam. Sehingga sering kali makna-makna syar'i dipersempit atau bahkan diperluas. Seperti pada kata, '*Ustadz*' oleh masyarakat dipersempit maknanya hanya untuk, 'guru ngaji' atau 'orang yang dianggap tahu tentang agama'. Padahal sumber makna kata ini berarti, 'guru' secara umum, guru di semua bidang kehidupan adalah '*ustadz*'.

Demikian pula kata *Khalifah*, masyarakat lebih cenderung memaknainya dengan makna meluas. Sebab secara politis dianggap aman bagi dirinya

apabila memaknai kata ‘Khilafah’ dengan pemimpin apapun juga baik pemimpin Rumah Tangga, Ketua RT dst. Penafsiran terhadap makna “*Kholifah fil ardhi*”, yaitu: ‘*Manusia dijadikan Allah Khalifah di muka bumi.*’ Ini bermakna umum. Sedangkan sejatinya kata ‘Khilafah’ sudah dipakai secara populer oleh umat Islam selama 1.300 tahun sebagai sebuah sistem kenegaraan yang menggunakan hukum Syariat sebagai sumber hukumnya. Hanya saja makna ‘Khilafah’ mengalami pergeseran makna. Ada yang menjadikannya sebagai nama sebuah pergerakan dalam cakupan nasional, yang sebenarnya apabila dikembalikan kepada makna yang sejatinya adalah kepemimpinan umum bagi umat Islam di dunia. Dan yang dimaksudkan adalah bahwa yang akan ditanamkan kepada umat bukan hanya Islam spiritual, namun Islam sebagai sistem kehidupan yang akan digunakan untuk mengatur berbagai urusan dan kemaslahatan umat.

B. Wilayah

IDEOLOGI BAHASA	KONTEK WILAYAH
WILAYAH	Titik awal tegaknya kembali sistem Khilafah di wilayah Indonesia dan meluas wilayahnya ke berbagai negara di dunia.

Kata *negara-negara muslim* menunjukkan bahwa entitas *khilafah* memerlukan teritori atau wilayah. Sebagaimana seharusnya syarat berdirinya negara yang

harus memiliki satu tempat diterapkannya aturan demikian pula keberadaan khilafah. Negara-negara muslim menjadi tempat yang berpotensi untuk diterapkannya ide khilafah. Setiap tempat berpotensi untuk tegaknya kekhilafahan.

Wilayah khilafah juga meliputi negeri-negeri non muslim yang negeri ini dapat diajak bekerja sama dengan entitas khilafah. Dalam negeri khilafah terdapat pula penduduk kafir dzimmi, yang keberadaan mereka dilindungi oleh khilafah. Mereka memiliki kewajiban membayar jizyah kepada khilafah. Khilafah dapat bekerjasama dengan negara tetangga dalam hal perdagangan, perjanjian damai. Namun apabila negara khilafah diperangi, maka wajib bagi negara khilafah untuk membalas tindakan penyerangan tersebut bahkan seluruh warga negaranya memiliki kewajiban yang sama untuk melibatkan diri membela negara khilafah.

Wilayah Indonesia dengan jumlah pulau tetap memiliki potensi untuk dijadikan wilayah diterapkannya kembali ide khilafah pada sebuah negara. Banyaknya pulau tidak akan menghalangi masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim untuk bersatu dibawah naungan Negara Khilafah Islam. Hal ini terbukti secara historis bahwa kekuasaan Khilafah sangat luas meliputi hampir 2/3 dunia bahkan sampai ke belahan wilayah eropa pernah berada dibawah naungan Negara Khilafah.

Sehingga banyaknya pulau, luasnya wilayah tidak akan menghalangi persatuan ummat dalam satu kepemimpinan dunia yaitu seorang Khalifah. Karena setiap wilayah akan dikendalikan oleh wali-wali yang di Indonesia

lebih dikenal dengan sebutan Sultan. Wali-wali ini bertugas mengendalikan kestabilan wilayahnya. Secara administratif diserahkan kepada masing-masing wilayah untuk mengelola wilayahnya secara desentralisasi sehingga rakyat akan mudah untuk mengurus berbagai keperluannya sehingga tidak ada birokrasi yang berbelit dan panjang.

Namun keuangan wilayah menggunakan sistem sentralisasi, terpusat pada ibukota Negara Khilafah atau pengendaliannya berada dibawah Khalifah, sehingga terjadi distribusi yang merata pada setiap wilayah, artinya tidak ada daerah yang sangat miskin atau ada daerah yang sangat kaya. Barang dan keuangan didistribusikan secara merata yang diatur secara adil oleh seorang Khalifah.

C. Kekuatan

IDEOLOGI BAHASA	KHILAFAH		
	IKATAN	HUBUNGAN	TUJUAN
KEKUATAN	Aqidah Islam	1. Muslim = saling berkasih sayang 2. Non-Muslim/Ahlul Dzimmah = melindungi 3. Kafir Harbi	Dakwah Islam dan jihad melegalformalkan kekuatan sistem Khilafah dalam sebuah negara agar dapat dirasakan

		= musuh yang harus diperangi	langsung oleh warga negaranya baik yang muslim maupun yang non-muslim dan musuh-musuhnya.
--	--	------------------------------	---

Kata *ideologi Islam* menunjukkan bahwa penduduk khilafah memiliki kekuatan/power untuk bertindak sesuai dengan hukum syari'at. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kekuatan dalam diri mereka bahwa mempertahankan khilafah adalah dalam rangka mengibadahi Allah SWT dan mati karenanya adalah mati syahid. Visi seorang muslim ketika pergi berperang bukan sekedar untuk memperoleh harta rampasan perang tetapi lebih daripada itu, yaitu untuk memperoleh keridhoan Allah semata dengan jaminan masuk surga bagi yang syahid.

Budaya masyarakat muslim memiliki karakteristik yang khas. Hal ini mempengaruhi kekuatan yang dibawa oleh masing-masing. Misalnya, pasukan muslim pada saat menghadapi perang Badar. Kekuatan 300 pasukan muslim sebanding dengan 1000 pasukan kafir. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ideologi berpengaruh besar terhadap mental seseorang.

Kekuatan yang besar pada setiap individu akan menciptakan masyarakat yang dinamis yang selalu bahu membahu membangun negara Khilafah. Fakta ini terbukti pada masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Azis setiap warga negaranya tidak ada orang yang layak menerima zakat karena seluruh warga negaranya hidup berkecukupan/kaya.

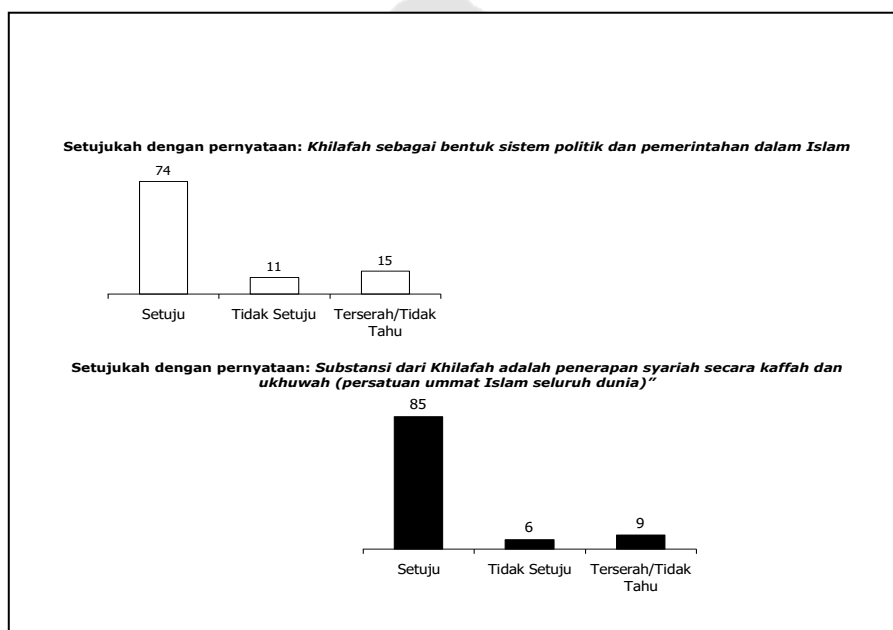
Penduduk Indonesia pun akan memiliki power/kekuatan yang sebanding apabila penduduk Indonesia hidup dibawah sistem negara Khilafah Islam. Kekuatan ini pernah ada terbukti dengan berkobarnya Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Demikian pula kesultanan Aceh atau lebih dikenal dengan Samudra Pasai yang dapat mempertahankan wilayahnya selama 60 tahun. Hal ini disebabkan oleh munculnya kekuatan pribadi yang tangguh dan berpengaruh, seperti, Teuku Umar, Tenku Cik Di Tiro bahkan tokoh-tokoh wanita pun berjuang memunculkan kekuatannya untuk melawan penjajah.

D. Alasan Terjadinya Opini Pro – Kontra

Masing-masing anggota masyarakat memiliki konsep pemahaman yang berbeda terhadap ide khilafah. Adanya perbedaan cara pandang mempengaruhinya, baik hal itu karena adanya perbedaan dalam mengartikan suatu bahasa oleh sebab latarbelakang pendidikan baik formal maupun non formal, latar belakang pekerjaan dan perilaku sosial masing-masing individu. Berkembangnya ide khilafah yang notabene dalam rangka mempersatukan umat dalam satu wadah kepemimpinan global untuk menciptakan masyarakat dunia yang damai, tidak terjadi perselisihan.

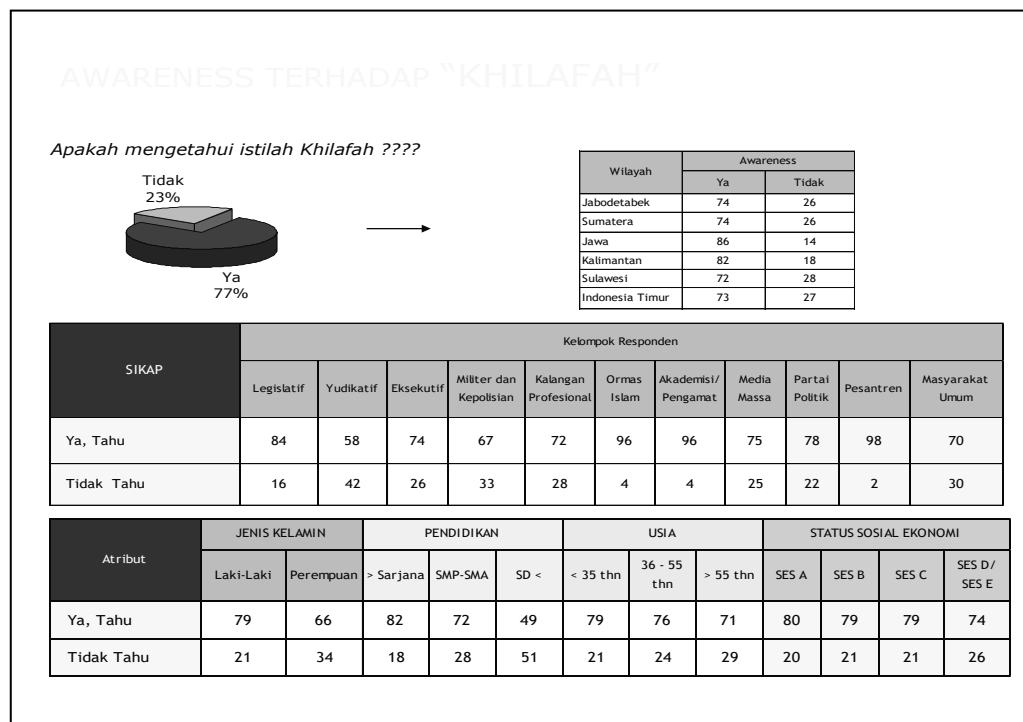
Opini pro dan kontra tentang adanya ide khilafah adalah satu hal yang wajar terjadi. Opini pro dan kontra ini adalah sesuatu yang niscaya terjadi di manapun. Budaya masyarakat Indonesia yang sekuler dengan adanya fakta, kebebasan beraqidah, berpendapat, berperilaku, berkepemilikan, semakin mempertajam adanya opini pro kontra terhadap ide khilafah.

Opini pro-kontra ini dikomparasikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh SEM Institute, sbb: **Sikap terhadap definisi dan substansi Khilafah**



Apabila dilihat dari hasil temuan survey diatas posisi pro terhadap ide khilafah selalu lebih besar atau mayoritas sedangkan posisi kontra selalu lebih kecil atau minoritas. Namun pada faktanya mengembalikan ide khilafah pada sebuah institusi negara tidak mudah. Terbukti dengan panjangnya perjuangan menegakkannya selama 84 tahun. Hal ini menjadi masalah besar ummat Islam untuk mencari sebab mengapa posisi minoritas selalu dapat memenangkan pihak mayoritas.

Survey ini mengambil responden yang sangat beragam seperti pada tabel berikut ini tentang, “Kesadaran terhadap ‘Khilafah’”:



Dari responden yang beragam tersebut semestinya pengembalian ide dalam sebuah institusi negara tidak ada halangan lagi. Untuk itu, perlu adanya momen untuk bersilaturahmi, tukar pikiran, saling terbuka sehingga dapat mengurangi adanya perbedaan-perbedaan dan mengedepankan persamaan-persamaan, yang di sana akan dijumpai satu titik. Satu titik itu adalah persatuan dan perdamaian dengan kebersamaan yang akan muncul apabila memiliki cara pandang (ideologi). Tidak dijadikan satu pertentangan. Sehingga dapat dikatakan pula, bahwa pendapat kita adalah benar, tetapi berkemungkinan untuk salah, pendapat mereka adalah salah, tetapi berkemungkinan untuk benar.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

- a. Telah terjadi pergeseran makna satu kata sehingga pergeseran makna ini mempengaruhi mental konsep pemakainya. Hal ini terbukti dengan kata *Khilafah* yang hanya bersinonim dengan kata *Imamah*, namun ditemukan kata *Khilafah* disamakan dengan kata, *Kepala*, *Imperium Islam*, sampai-sampai untuk mendeskripsikannya disepadankan dengan kata *Terrorisme*. Sehingga umat Islam lebih cenderung memaknai khilafah dalam arti kepemimpinan dalam segala bidang bukan kepemimpinan dalam sebuah negara Islam.
- b. Ideologi bahasa pada ide khilafah dapat dijumpai pada adanya spiritualitas, territory/wilayah dan power/kekuatan. Ketiga hal ini tidak dapat lepas dari ide Khilafah sebab ide ini selalu diperjuangkan untuk dilegalformalkan dalam sebuah institusi negara yang pasti membutuhkan ketiga hal tersebut secara mutlak. Tanpa ketiganya, ide khilafah akan terus sekedar menjadi ide dan masyarakat tidak dapat merasakan spiritualitas, wilayah dan kekuatan dari ide Khilafah.
- c. Dijumpai makna kalimat yang tergolong pro maupun kontra terhadap ide khilafah yang merupakan faktor alamiah dari sebuah ide. Opini pro kontra merupakan cermin budaya Indonesia bahwa setidaknya ada dua sisi, yaitu

pihak pro, muslim yang masih murni atau pihak kontra, muslim yang sekuler. Dari validasi data ditemukan bahwa sebenarnya pihak kontra jumlahnya minoritas, namun pihak ini selalu memenangkan opini publik. Sehingga budaya masyarakat sekuler lebih mendominasi yang berakibat ummat Islam sulit bersatu dalam naungan Negara Khilafah.

B. Saran

Hendaknya ada yang melanjutkan penelitian bahasa ini terkait dengan ideologi, ideologi bahasa dan ideologi khilafah terhadap pembentukan peradaban baru yang membawa pencerahan bagi khasanah budaya masyarakat Indonesia, khususnya, dan masyarakat dunia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Abdulgani, Dr. H. Roeslan. 1980. *Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara*. Aceh Timur: Makalah.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1996. *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Bangil – Jatim: Al-Izzah.
- _____. 1995. “*Ma’fhum al-Khalifah wa al-Khilafah fi al-Hadharah al-Islamiyah*”. Majalah *Al-Khilafah al-Islamiyah*. No.1 Th I. Sya’ban 1415 H/Januari 1995 M. Jakarta: Al-Markaz Al-Istitiratiji li al-Buhuts al-Islamiyah.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad ibn Abdurrahman (Qadhi Shafd). 1996. *Rahmah al-Immah fi ikhtilaf al-A’immah*. Cetakan I. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1999. *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*. Juz V. Cetakan I. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid. 1980. *Qawa’id Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Kuwait: Darul Bahuts al-‘Ilmiyah).
- Ambary, Hasan M. Dan Bachtiar Aly. T.t. *Aceh dalam Retrospeksi dan Refleksi Budaya Nusantara*. Jakarta: Informasi Taman Iskandar Muda.
- Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mu’jam al-Wasith I*. Kairo: Darul Ma’arif.
- _____. 1972. *Al-Mu’jam Maqayis al-lughoh II*. Kairo: Darul Ma’arif.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. *As-Syakhshiyah al-Islamiyah*. Juz III. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb Al-Tahrir.
- _____. 1953. *As-Syakhshiyah al-Islamiyah*. Juz II. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb Al-Tahrir.
- _____. 1963. *Al-Ma’lumat li Asy-Syabab*. T.tp: t.p.
- _____. 2006.. *Daulah Islam*. Jakarta: HTI-Press.
- _____. 1963. *Muqaddimah ad-Dustur*. T.tp: t.p.
- _____. 2001. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul ‘Izzah.

- _____. 2003. *At-Taḥkīr*. Bogor: Pustaka Thariqul ‘Izzah.
- Ath-Thabari, Imam. 1970. *Tafsir Ath-Thabari I*. T.tp: t.p.
- Ath-Thamawi, Sulaiman. 1967. *As-Sulḥat ats-Tsalats fi Ad-Ḍasatir al-Arabiyyah al-Mu’ashirah wa fi Ad-Ḍasatir al-Arabiyyah al-Mu’ashirah wa fi al-Fikr as-Siyasi al-Islami*. Kairo: Darul Fikr al-Arabi.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IX (Al-Mustadrak). Cetakan I. Damaskus/Beirut: Darul Fikr.
- Belhaj, Ali. 1991. *Tanbih al-Ghafilin wa I’lam al-Ha’irin bi Anna I’adah al-Khilafah min A’zham Wajibat Hadza ad-Din*. Beirut: Darul ‘Uqab.
- Benassi, Giuliano. T.tt *Political Correctness and Ideology: A Cross-Cultural Linguistic Study*. T.Tp: Universität Konstanz.
- Chaer, Abdul. 2006. *Leksikologi & Leksikografi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2007. *Kajian Bahasa: Struktur Internal, Pemakaian dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daly, Peunoh. 1982. *Disertasi: Hukum Nikah, Talak, Rujuk, Hadanah dan Singkel*. Jakarta: Fakultas Syari’ah, IAIN Syarif Hidayatullah.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1999. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.
- Edi-Subroto, D. 1989. *Semantik Leksikal II*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Edelman, Murray. 1993. *Contestable Categories and Public Opinion*. Political Communication. Vol. 10. No. 3.
- Fairclough, Norman. 1992. *Language and Power*. London and New York: Longman Group.
- Foley, William A. 2002. *Anthropological Linguistics, An Introduction*. United Kingdom:mBlackwell Publishers Ltd.

- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar, Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: 2005.
- Goetz, Judith Preissle. 1984. *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*. London: Academic Press.
- Harsono, Siswo. 1999. *Metodologi Penelitian Sastra*. Semarang: Yayasan Deaparamartha.
- Hasyimi, Prof. Ali 1984. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bogor: PTI.
- Heinrich, Patrick. 2002. *Language Ideology in Modern Japan*. T.tp: T.p.
- Hidayat, Asep Ahmad. 2006. *Filsafat Bahasa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hisyam, Ibnu. 2000. *Sirah an-Nabi. Jilid I*. Jakarta: Darul Falah.
- _____. 2001. *Sirah an-Nabi. Jilid II*. Jakarta: Darul Falah.
- Hodge, Robert and Gunther Kress. 1993. *Language as Ideology, Second Edition*. London and New York: Routledge and Kegan Paul,
- Hornby, AS. 1989. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Islamlib. 2002. [http://islamlib.com/id/page.php\\$page=article&id=89](http://islamlib.com/id/page.php$page=article&id=89)
- Jacobs, Andrea Michele. 2004. *Language Reform as Language Ideology: An Examination of Israeli Feminist Language Practice*. Austin: The University of Texas.
- Maghfur W, Muhammad. 2002. *Koreksi atas Kesalahan Pemikiran Kalam dam Filsafat Islam*. Bangil – Jatim: Al-Izzah.
- Mimbar. 2000. *Majalah Islam*. Jakarta: Mimbar
- Moschonas, Spiros. A. 2004. *Relativism in Language Ideology on Greece's Latest Language Issues*. Dalam Journal of Modern Greek Studies, Volume 22 University of Athens.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Cetakan I. Yogyakarta: PP. Al-Muwawwir Krapyak.

- Noer, Deliar. 1987. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Bogor: PTI.
- Nurhayati. 2005. *Perbedaan Ideologis dalam Pembungkahan Berita*. dalam Jurnal Kajian Sastra Vol. 29, No.1, Januari 2005. Semarang: Fakultas Sastra Universitas Diponegoro.
- Pateda, Mansoer. 1982. *Semantik Leksikal*. Ende: Nusa Indah.
- Patton, Michael Quinn. 1987. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. California: Sage Publications.
- Pusponegoro, Marwati Djuned. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia. Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridha, Rasyid. 1964. *Al-Khilafah*. T.tp: t.p.
- Samarin, William J. 1967. *Field Linguistics: A Guide to Linguistic Field Work*. USA: Holt, Rinehart and Winston.
- Simpson, Paul. 1993. *Language, Ideology and Point of View*. London: Routledge.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1984. *Menemukan Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjandrasasmita, Uka. 2000. *Hubungan Perdagangan Indonesia-Persia (Iran) Pada Masa Lampau (Abad VII-XVII M) dan Dampaknya terhadap Beberapa Unsur Kebudayaan*. Jauhar: Vol.1. No.1. Desember.
- _____, Uka. 2000. *The Indonesian Harbour Cities and the Coming of Portuguese. Indonesia –Portugal: Five Hundred Years of Historical Relationship*. Jakarta: UI dan The Portuguese Center.
- Thaib, Lukman. 2000. *Aceh Case: Possible Solution to Festering Conflict*. Journal of Muslim Minority Affairs, Vol.20. No.1
- Ulman, Stephen. 1970. *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning*. Oxford: Basil Blackwell.
- Wijana, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2008. *Semantik: Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Woolard, Kathryn A. And Bambi B. Schieffelin. 1994. *Language Ideology*. Annual Review of Anthropology No.23: 55 – 82

Wray, Alison. 1998. *Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language*. Great Britain: Arnold.

Zainuddin, H.M. 1961. *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda.

Zallum, Abdul Qadim. 1985. *Hizb at-Tahrir*. T.tp.: t.p.

_____. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah.



LAMPIRAN

